



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

TESIS



**ESI DESMIATI
06206061**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

Oleh **ESI DESMIATI**

(Di bawah bimbingan Dr. Nasri Bachtiar SE, MS dan Prof.Dr. Elfindri, SE, MA)

RINGKASAN

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Menurut data BPS, jumlah rumahtangga miskin pada tahun 2005 mencapai 24,53 persen dari seluruh rumahtangga yang ada di Sumatera Barat.

Terjadinya kemiskinan diakibatkan adanya beberapa faktor penyebab, seperti tingkat pendidikan yang rendah, etos kerja atau budaya kerja yang rendah, luas lahan produktif yang dimiliki sangat terbatas dan sulit untuk mengakses informasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang rendah, etos kerja atau budaya kerja yang rendah, luas lahan produktif yang dimiliki sangat terbatas dan sulit untuk mengakses informasi. Terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan Regresi Logistik dengan menggunakan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada tahun 2005 dengan sampel rumahtangga sebanyak 10.592 rumahtangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala rumahtangga yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) cenderung rumahtangganya miskin sebesar 2,275 kali di perkotaan dan sebesar 1,804 kali di daerah pedesaan dibanding kepala rumahtangga yang berpendidikan SLTA ke atas. Selanjutnya rumahtangga yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu cenderung rumahtangganya miskin sebesar 1,444 kali (pedesaan) dan sebesar 1,538 (perkotaan) dibanding kepala rumahtangga yang bekerja 35 jam ke atas perminggu. Selanjutnya, rumahtangga yang akses informasinya sulit cenderung miskin sebesar 5,702 kali (pedesaan) dan sebesar 4,267 kali (perkotaan) dibanding dengan rumahtangga yang tidak sulit akses informasinya. Sedangkan luas lahan (perkotaan dan pedesaan) dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap terbentuknya rumahtangga miskin, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif dan nilai $\text{Exp}(B)$ di bawah satu.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

Oleh:

ESI DESMIATI

06 206 061

TESIS

Sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

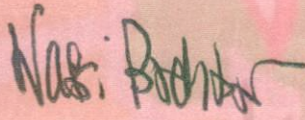
**PADANG
2008**

Judul Penelitian : Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Sumatera Barat
Nama Mahasiswa : Esi Desmiati
Nomor BP : 06.206.061
Program Studi : Perencanaan Pembangunan

Tesis ini telah diuji di hadapan Dosen Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 19 Juli 2008

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

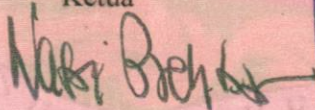


Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS
Ketua

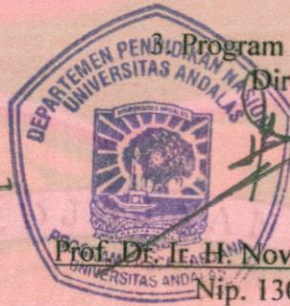


Prof. Dr. Elfindri, SE, MA
Anggota

2. Program Studi
Perencanaan Pembangunan
Ketua



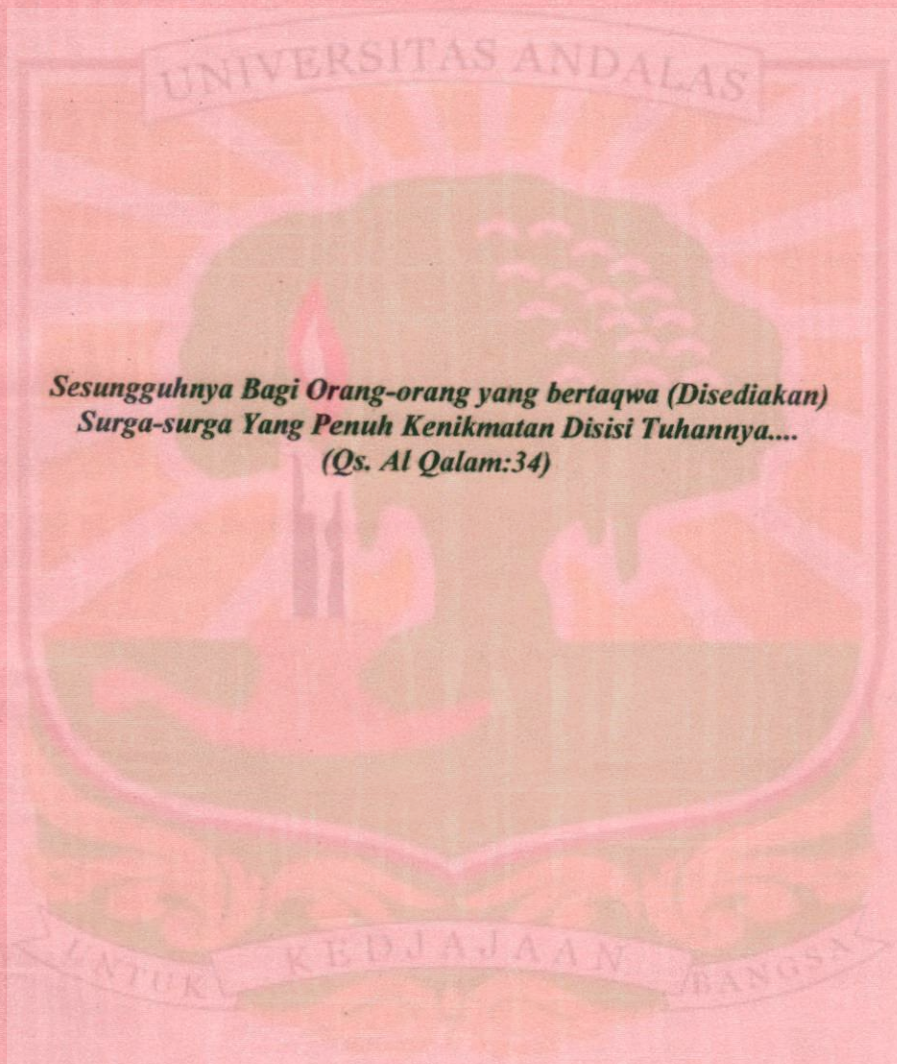
Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS
Nip. 131 656 510



3. Program Pascasarjana
Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun Msc.
Nip. 130 819552

***Allah Meninggikan Orang-orang Yang Beriman Diantara Kamu Dan Orang-orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan. Beberapa Derajat.....
(Qs. Almujaadilah:11)***



***Sesungguhnya Bagi Orang-orang yang bertaqwa (Disediakan)
Surga-surga Yang Penuh Kenikmatan Disisi Tuhannya....
(Qs. Al Qalam:34)***

Kupersembahkan tulisan ini untuk orang-orang tercinta, orang tua , suami dan anak-anakku tersayang.

RIWAYAT HIDUP


Penulis dilahirkan di Gaung (Solok) Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1965 sebagai anak tunggal dari Bapak Parman dan ibu Rasini (Alm).

Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Gaung pada tahun 1979, kemudian menamatkan pendidikan SLTP di SMPN 3 Kota Solok pada tahun 1982. Pada tahun 1985 Penulis berhasil menamatkan pendidikan SLTA dari SMEA Solok. Penulis memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) jurusan Pendidikan Akuntansi dari IKIP Padang pada tahun 1990. Sejak tahun 2006 melalui program Bea siswa Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang pada Program Studi Perencanaan Pembangunan.

Penulis bekerja sebagai guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 3) Kota Solok sampai dengan sekarang.

Padang, Juli 2008

Penulis



ESI DESMIATI
BP : 06.206.061

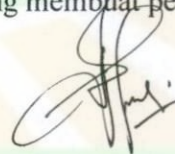
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pernyataan dalam tesis saya yang berjudul : "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT" adalah hasil kerja saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Juli 2008
Yang membuat pernyataan



ESI DESMIATI
BP : 06.206.061



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmatNYA juga sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Pada kesempatan ini penulis merasa perlu untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Nasri Bachtiar, SE,MS sebagai pembimbing utama dan kepada Bapak Prof. Dr. Elfindri,SE, MA sebagai ko-pembimbing. Banyak waktu dan arahan dari kedua pembimbing tersebut yang telah dicurahkan dalam rangka penulisan Tesis ini, semoga semua itu dapat dijadikan amal baik. Amiin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Kepala BPS Kota Solok beserta staf yang telah memberikan data Susenas 2005
4. Kepada rekan-rekan seangkatan yang telah banyak membantu.
5. Kepada ayahanda yang selalu memberi dukungan serta semangat.
6. Kepada suami dan anak tercinta yang telah bersedia berkorban baik materil maupun dukungan semangat.

"Tak ada gading yang tak retak" penulis sadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih memungkinkan banyak ditemui kelemahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna lebih menyempurnakannya.

Padang, Juli 2008

Penulis



ESI DESMIATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB. II TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Konsep Kemiskinan.....	8
2.2 Ukuran Kemiskinan.....	11
2.3 Penyebab Kemiskinan	14
2.3.1. Tingkat Pendidikan	16
2.3.2. Budaya Kerja	25
2.3.3. Luas Penguasaan Lahan	26
2.3.4. Akses Informasi	28
2.4 Penelitian Terdahulu.....	30
2.5 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Kerangka Analisis	33
2.6. Hipotesis	35
BAB. III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Daerah Penelitian	36
3.2 Data dan Sumber Data	37
3.3 Metode Analisa Data	38
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	43
BAB. IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Komposisi Penduduk Sumatera Barat	46
4.2 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Rumahtangga Miskin	50
4.2.1. Garis Kemiskinan	51
4.2.1. Perkembangan Rumahtangga Miskin	54
4.3 Karakteristik Rumahtangga Miskin di Sumatera Barat.....	56

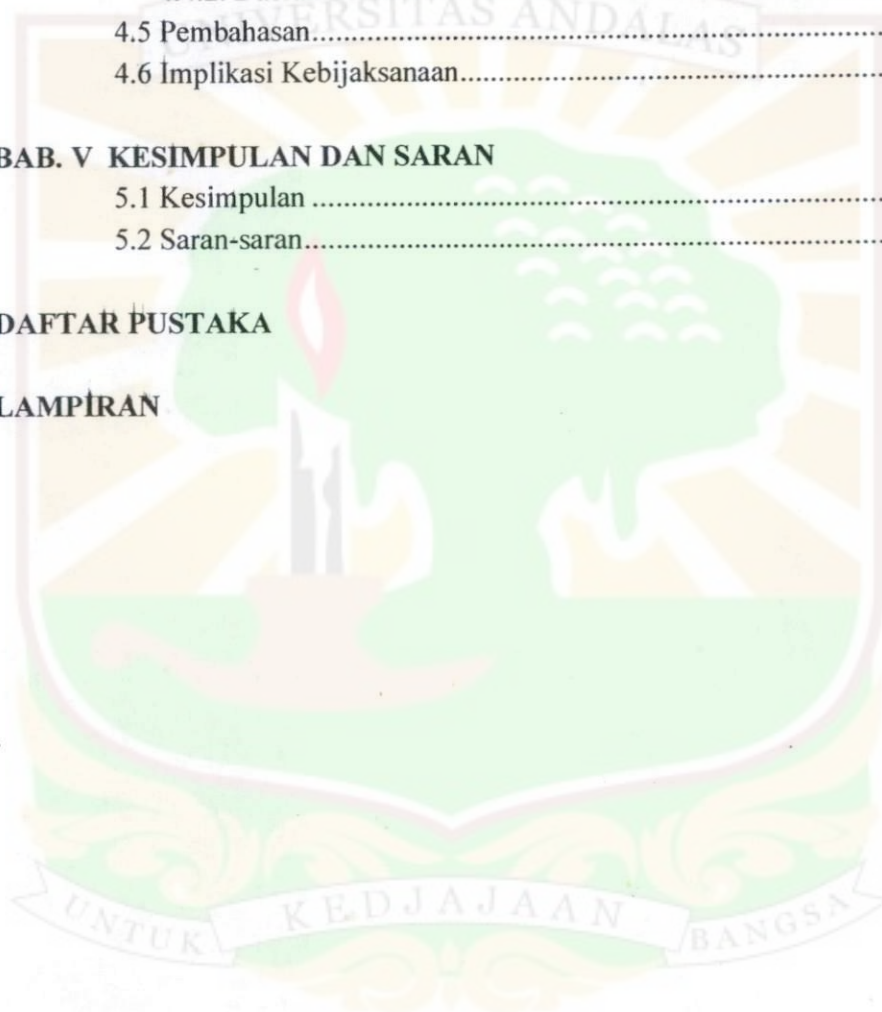
4.3.1. Rumahtangga Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga.....	58
4.3.2. Rumahtangga Miskin Menurut Budaya Kerja (Jam Kerja Perminggu).....	61
4.3.3. Rumahtangga Miskin Menurut Kepemilikan Luas Lahan.....	63
4.3.4. Rumahtangga Miskin Menurut akses Informasi.....	65
4.4 Hasil Estimasi	66
4.4.1. Daerah Pedesaan.....	67
4.4.2. Daerah Perkotaan.....	72
4.5 Pembahasan.....	78
4.6 Implikasi Kebijakan.....	81

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat Tahun 1999, 2003 dan 2005.....	3
Tabel 2.1	Batas Kemiskinan Diukur dengan Nilai Tukar Beras Pertahun.....	13
Tabel 4.1	Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2	Penduduk Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal.....	49
Tabel 4.3	Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1999, 2002 dan 2005.....	52
Tabel 4.4	Persentase Rumahtangga Miskin Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1999 dan 2005	54
Tabel 4.5	Persentase Rumahtangga Miskin Sumatera Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2005	57
Tabel 4.6	Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kondisi Rumahtangga dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumahtangga Tahun 2005	59
Tabel 4.7	Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kondisi Rumahtangga dan Jam Kerja Perminggu Tahun 2005	61
Tabel 4.8	Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kondisi Rumahtangga dan Kepemilikan Luas Lahan Tahun 2005	63
Tabel 4.9	Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kondisi Rumahtangga dan Akses Informasi Tahun 2005	65
Tabel 4.10	Hasil Penghitungan Regresi Logistik (Daerah Pedesaan)	67
Tabel 4.11	Hasil Penghitungan Regresi Logistik (Daerah Perkotaan)	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	15
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran penyebab kemiskinan.....	33
Gambar 4.1 Pyramida penduduk Sumatera Barat Tahun 2005.....	48



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kemiskinan di Indonesia baru mendapatkan perhatian luas sejak tahun 1993, perhatian semakin besar setelah pemerintah memperkenalkan program Inpres Desa Tertinggal pada tahun 1994. Walaupun demikian, analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah ini masih terbatas jumlahnya. Baru setelah Indonesia dilanda badai krisis ekonomi maka analisis masalah kemiskinan mulai mendapatkan perhatian lebih luas, terutama karena urgensi untuk menganalisis dampak krisis terhadap tingkat kemiskinan dan berbagai prospek sosial ekonomi lainnya.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat multi dimensi, baik dimensi ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam perspektif ekonomi kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Ketidakmampuan tersebut diukur dengan tingkat pendapatan tertentu atau yang dikenal dengan garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan tingkat pendapatan ini kemudian lebih dikenal dengan kemiskinan secara absolut (Sumodiningrat; 1998: 26).

Lebih jauh Hagul (1986:5) menyatakan bahwa kemiskinan sesungguhnya merupakan rangkaian fenomena yang terkait satu sama lain. Orang miskin bukanlah kelompok yang terisolasi dan berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai

hubungan kerja yang cenderung bersifat eksploitatif. Selain itu, orang miskin umumnya tidak mempunyai harta dan mempunyai kualitas kehidupan sosial yang rendah serta tidak mempunyai pengaruh dan kekuasaan. Akibatnya, banyak orang miskin memiliki kemampuan yang lemah dalam berusaha serta tidak memiliki akses yang baik terhadap kehidupan ekonomi demi mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Setelah krisis ekonomi berjalan pada tahun keempat dimana berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan masih tetap menjadi masalah yang masih tetap memerlukan perhatian yang lebih besar lagi. Permasalahan kemiskinan yang masih terus berkembang salah satu adalah diakibatkan pendapatan masyarakat yang cenderung tidak meningkat bahkan ada sebagian dari masyarakat menerima pendapatan yang menurun. Sementara itu, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat selama masa krisis ekonomi cenderung terus mengalami peningkatan, sehingga garis kemiskinan juga terus bergerak semakin tinggi dan banyak masyarakat yang tidak dapat mengimbangi dengan pendapatan yang mereka peroleh.

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia juga termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Menurut hasil pengumpulan data oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 1999-2005 cukup berfluktuasi. Pada awalnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 1999 terdapat sebanyak 566.133 orang, artinya terdapat penduduk sebanyak 566.133 orang yang tidak mampu melewati batas garis kemiskinan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2003

jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat terjadi penurunan dan hanya tercatat sebanyak 501,1 ribu orang. Namun, pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 824,3 ribu orang.

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase penduduk miskin di Sumatera Barat Tahun 1999, 2003 dan 2005

No (1)	Deskripsi (2)	Sumatera Barat		
		1999 (3)	2003 (4)	2005 (5)
1	Batas miskin (Rp/Kapita/bulan)	86.497	137.095	169.887
2	Banyaknya penduduk miskin (jiwa)	566,1	501,1	824,3
3	Persentase Rumahtangga miskin	12,03	11,24	24,53

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan 1999, 2003 dan 2005

Demikian pula halnya dengan jumlah rumahtangga miskin, dimana pada tahun 2005 rumahtangga miskin di Sumatera Barat mencapai 24,53 persen dari seluruh rumahtangga yang ada di Sumatera Barat.

Terjadinya kemiskinan diakibatkan adanya beberapa faktor penyebab, seperti masih banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikan rendah, etos kerja atau budaya kerja yang rendah, luas lahan produktif yang dimiliki sangat terbatas dan sulit untuk mengakses informasi. Akibat dari semua faktor di atas menggiring masyarakat pada kondisi yang kurang menguntungkan seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan minimalnya produktivitas yang dihasilkan karena lahan yang mereka miliki terlalu sempit.

Variabel pendidikan dalam hal ini menjadi faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan mereka untuk dapat mengembangkan wawasannya sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk mengembangkan kreativitas di berbagai bidang. Dengan rendahnya daya kreativitas masyarakat maka akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki taraf hidup.

Berdasarkan data BPS, dari seluruh rumahtangga miskin di Sumatera Barat tercatat sebanyak 77,29 persen kepala keluarganya berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) sedangkan kepala keluarga rumahtangga miskin yang berpendidikan SLTA ke atas hanya tercatat sebanyak 22,71 persen.

Demikian juga halnya dengan variabel budaya kerja yang diaplikasikan dengan rata-rata jam kerja. Bagi penduduk yang memiliki rata-rata jam kerja di bawah normal (37,5 jam per minggu) yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas berusaha akan berakibat pada rendahnya pendapatan mereka. Dengan jam kerja di bawah normal biasanya akan berakibat pada rendahnya produktivitas sehingga variabel budaya kerja ini menjadi salah satu penyebab yang dapat membentuk kemiskinan.

Sementara itu, di daerah pedesaan pada umumnya penduduk miskin bekerja pada sektor pertanian yang **tidak** didukung dengan modal yang memadai seperti hanya mengandalkan lahan pertanian yang sempit. Berdasarkan hasil survey BPS menyebutkan bahwa sekitar 74,23 persen dari seluruh penduduk miskin di Sumatera Barat hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha,

sedangkan penduduk miskin yang memiliki luas lahan lebih dari 0,5 Ha hanya tercatat sebanyak 25,77 persen.

Akses informasi bagi sebagian daerah masih menghadapi kendala terutama di daerah pedesaan, dimana dengan lokasi daerah yang masih terisolasi mengakibatkan informasi yang masuk ke daerah tersebut menjadi cukup sulit. Akibatnya, masyarakat di sekitar daerah tersebut menjadi miskin dengan wawasan. Berdasarkan hasil survey BPS menyebutkan bahwa sekitar 74,99 persen dari seluruh penduduk miskin di Sumatera Barat menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi. Akibatnya wawasan yang mereka miliki menjadi sangat minim sehingga mereka mendapat kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Akses informasi dalam hal ini diartikan sebagai kemudahan penduduk dalam menyerap berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai kemajuan di segala bidang seperti ilmu pengetahuan, pengelolaan lahan, dan pengetahuan lainnya baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Secara teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terdiri atas penguasaan lahan, tingkat pendidikan, rendahnya jam kerja dan akses terhadap sumber informasi. Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Sejauhmanakah pengaruh tingkat pendidikan, jam kerja, luas penguasaan lahan, dan akses informasi secara parsial terhadap kemiskinan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat ?

- b. Sejauhmanakah tingkat pendidikan, jam kerja, luas penguasaan lahan dan akses informasi secara bersama-sama berpeengaruh terhadap kemiskinan rumahtangga di Propinsi Sumatera Barat ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah :

- i. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, budaya kerja, penguasaan lahan, dan akses informasi secara parsial terhadap kemiskinan rumahtangga di Propinsi Sumatera Barat
- ii. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, jam kerja, luas kepemilikan lahan dan akses informasi secara bersama-sama secara bersama-sama terhadap kemiskinan rumahtangga di Propinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Peneelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai :

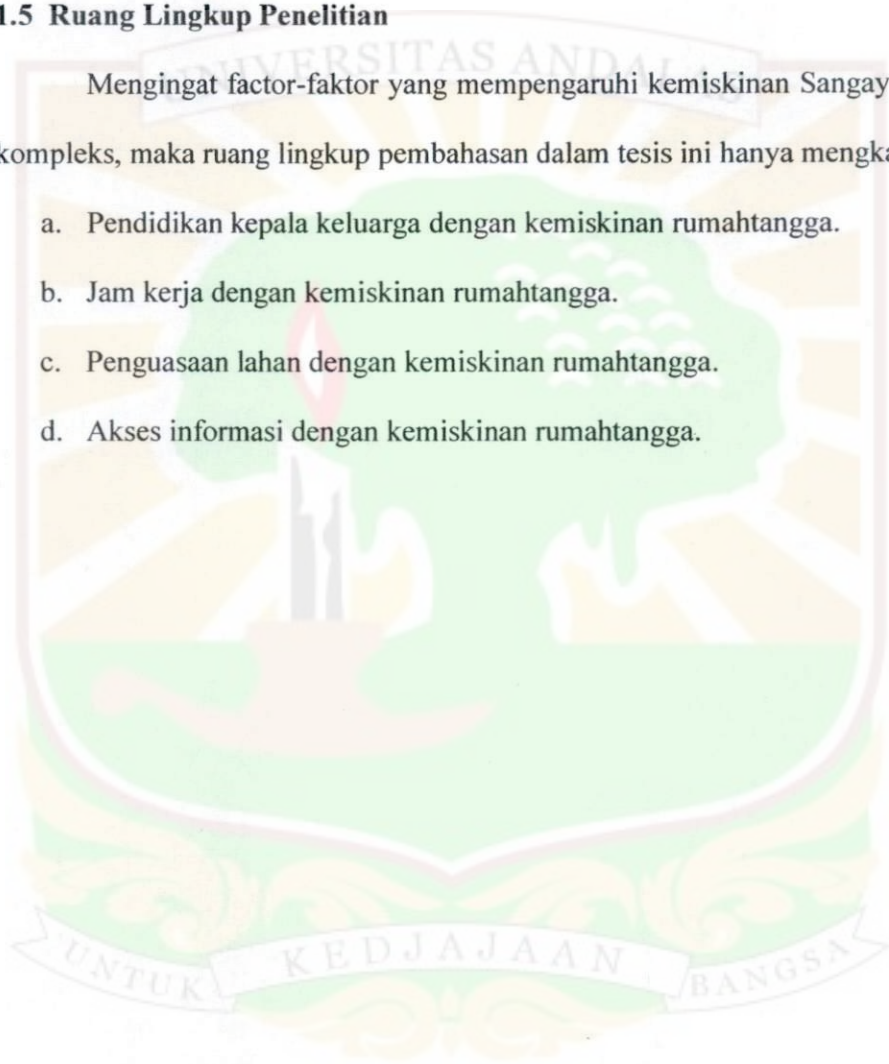
- i. Bahan masukan bagi pemerintah terutama dalam rangka mengevaluasi kebijaksanaan dan menyusun perencanaan yang akan datang yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat.
- ii. Bagi peneliti sendiri diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan terutama yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat.

- iii. Bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam penelitian tentang perkembangan dan pengentasan kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan Sangay luas dan kompleks, maka ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini hanya mengkaji :

- a. Pendidikan kepala keluarga dengan kemiskinan rumahtangga.
- b. Jam kerja dengan kemiskinan rumahtangga.
- c. Penguasaan lahan dengan kemiskinan rumahtangga.
- d. Akses informasi dengan kemiskinan rumahtangga.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Kemiskinan

Pengertian atau pemahaman kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diartikulasikan. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi di sekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya (Esmara.1986)..

Selanjutnya, menurut konsep ekonomi kemiskinan adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Namun, sampai saat ini masih diperdebatkan berapa jumlah pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dalam perkembangannya bukan jumlah pendapatan saja yang diperdebatkan tetapi jenis barang yang termasuk dalam kategori kebutuhan pokok juga masih belum ada kesepakatan yang jelas.

Meskipun kemiskinan menurut konsep ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemungkinan juga dapat diukur dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah, yang tercermin didalamnya kemauan untuk tertinggal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas,

terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari penjelasan konsep kemiskinan di atas, jelas bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dalam hal perkiraan kebutuhan hanya pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Ini berarti diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum sehingga memungkinkan orang atau keluarga tersebut memperoleh kebutuhan dasarnya.

Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimumnya. Tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau biasa disebut *garis kemiskinan*.

Seseorang dikatakan *miskin secara absolut* apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (natural). Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap

makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1987; 62)

Kemiskinan kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha pihak luar untuk membantu. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Kemiskinan relatif adalah pendapatan seseorang/rumahtangga yang sudah berada diatas garis kemiskinan, namun relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumahtangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Menurut John Kenneth Galbraith, 1978 walaupun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Sedangkan Herman P Miller melihat kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan kebudayaan sekitarnya daripada lingkungan orang atau keluarga bersangkutan, Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

2.2 Ukuran Kemiskinan

Dalam kajian tentang kemiskinan sering muncul istilah penduduk miskin, kemiskinan pedesaan dan kemiskinan perkotaan. Ketiga istilah ini sering digunakan dalam satu pengertian yang maksudnya adalah penduduk yang menderita kemiskinan. Untuk membedakan penduduk miskin dengan penduduk yang tidak miskin biasanya digunakan garis pembatas yang disebut garis kemiskinan. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk miskin.

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ditunjukkan dalam rupiah/kapita/bulan (BPS,1990). Garis kemiskinan adalah angka absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi hidup minimumnya ini yang disebut kemiskinan absolut.

Konsep dasar ukuran kemiskinan berhubungan dengan pengeluaran kebutuhan dasar minimum rata rata seorang individu hidup normal. Kebutuhan dasar termasuk pilihan makanan dasar dan golongan bukan makanan. Jika seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa individu tersebut dapat di kategorikan miskin. Jumlah pengeluaran dapat digunakan batas antara miskin dan tidak miskin. Batas ini disebut juga dengan garis kemiskinan.

Menurut konsep pengeluaran yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori perkapita perhari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. Besarnya pengeluaran per kapita yang ditentukan sebagai garis kemiskinan dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Kebutuhan pokok selain makanan meliputi perumahan (penerangan, bahan bakar, dan air bersih), pakaian, barang tahan lama, dan jasa. Untuk pengeluaran jenis makanan BPS tidak terpaku pada salah satu jenis makanan seperti beras sebagai patokan. Dengan demikian nilai uang dari jumlah kalori tersebut dihitung berdasarkan rasio konsumsi makanan terhadap konsumsi total rumah tangga sehingga diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai batas garis kemiskinan.

Disamping perkiraan garis kemiskinan nasional, telah dilakukan pula beberapa perkiraan mengenai garis kemiskinan internasional didalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan Sayogyo (1977) untuk daerah pedesaan dan perkotaan masing masing sama dengan 20 kg dan 30 kg beras dalam nilai rupiah pendapatan perkapita rata rata individu. Sayogyo mengajukan ukuran garis kemiskinan untuk wilayah Indonesia, memperinci garis kemiskinan yang mempunyai ciri :

- (a) spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi nilai ambang kecukupan pangan.

(b) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan (kalori dan protein).

Berdasarkan dari beberapa penelitian, Sayogyo mengklasifikasikan suatu wilayah menjadi tiga, yaitu: miskin, miskin sekali, dan yang paling miskin baik untuk daerah pedesaan maupun untuk kota sebagai dibawah ini.

Tabel 2.1. Batas Kemiskinan Diukur dengan Nilai Tukar Beras Pertahun

Klasifikasi	Nilai Tukar Beras/Orang/Tahun	
	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)
Miskin	480 Kg	320 Kg
Miskin Sekali	360 Kg	240 Kg
Paling Miskin	270 Kg	180 Kg

Sumber : Sayogyo (1977)

Konsumsi beras minimum sebesar 125 kg per orang pertahun telah dipergunakan oleh Esmara selaku salah satu alternatif garis kemiskinan di Indonesia. Disamping perkiraan kebutuhan beras minimum dan pengeluaran minimum, Esmara memperkirakan pula kebutuhan gizi minimum baik kebutuhan kalori maupun kebutuhan protein per orang perhari. Sebaliknya Repelita III Indonesia memperkirakan kebutuhan gizi minimum sebesar 2100 kalori dan 46 gr protein per orang perhari.

Dari pendekatan kemiskinan yang menjadi alat utama ukuran kemiskinan saat ini adalah kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang garis batasnya

ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan pokok manusia per hari berupa kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan yang dinyatakan dalam satuan mata uang.

2.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan saling terkait. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan dapat dibedakan atas pendekatan ekonomi, sumber daya manusia dan pendekatan sosial budaya. Pendekatan ekonomi lebih menitikberatkan pada lingkungan penduduk miskin itu sendiri seperti terlihat dari pendapatan yang rendah, gizi buruk, tingkat kematian yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah.

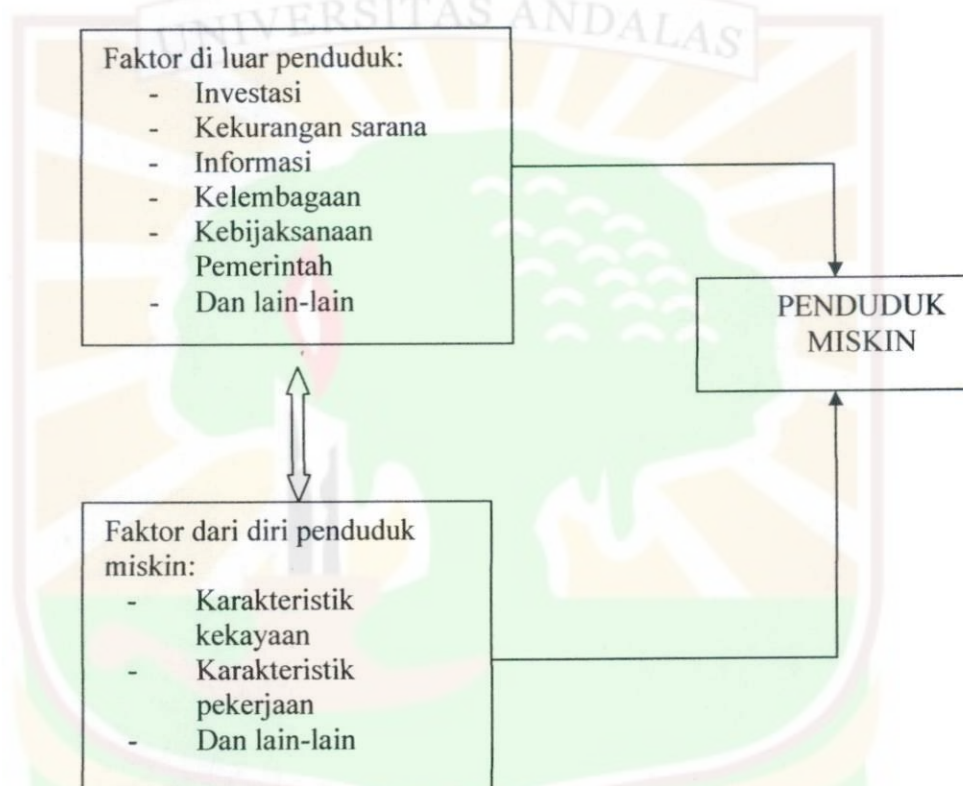
Pendekatan sumber daya manusia lebih menekankan pada kualitas dari sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini dinyatakan bahwa penduduk menjadi miskin disebabkan oleh keterbelakangan dan ketidaktahuan. Keterbelakangan disebabkan oleh penduduk tidak mengenyam pendidikan dan untuk mendapat pendidikan terhambat karena kondisi kemiskinan. Akibatnya penduduk tersebut menjadi serba tidak tahu dan terbelakang.

Sementara pendekatan sosial budaya lebih banyak melihat dari diri penduduk miskin seperti menganalisis cara hidup dan tingkah laku penduduk miskin.

Dari ketiga pendekatan yang dikemukakan ini, pendekatan ekonomi dan pendekatan sumber daya manusia lebih banyak digunakan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan. Berdasarkan kedua pendekatan ini faktor kemiskinan dapat dibedakan atas dua faktor secara garis besar. Faktor pertama

yaitu faktor yang berasal dari luar penduduk miskin terdiri dari kekurangan investasi, sarana, informasi dan lain-lainnya. Faktor kedua adalah faktor yang bersumber dari penduduk itu sendiri, seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan lain-lain. (Gambar 2.1.)

Gambar 2.1 : Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan



Sumber : BPS, Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi Penduduk Miskin (1999)

Berdasarkan hal diatas maka faktor-faktor penyebab kemiskinan yang akan dilihat adakah faktor dari diri penduduk miskin itu yakni karakteristik dari penduduk miskin tersebut.

Seperti diketahui bahwa penduduk miskin mempunyai sumber pendapatan yang terbatas dibandingkan dengan penduduk yang tidak miskin. Pendapatan yang terbatas yang didapat oleh penduduk miskin tersebut karena di daerah perkotaan

pekerjaan pada sektor informal umumnya penghasilan yang di dapat lebih rendah dari pada penghasilan pada sektor formal.

Adapun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan tersebut `adalah sebagai berikut :

2.3.1 Tingkat Pendidikan

Investasi sumberdaya manusia bukan merupakan tanggung jawab salah satu sektor pembangunan tetapi bersifat multisektor seperti pendidikan, kesehatan, program kependudukan dan lain-lain. Namun demikian, diantara berbagai bentuk investasi sumber daya manusia tersebut, pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator utama pengembangan sumber daya manusia dengan asumsi bahwa semakin terdidik seseorang semakin tinggi pula kesadarannya terhadap pembentukan keluarga sejahtera.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut merupakan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar. Program wajib belajar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan. Program pendidikan tidak seluruhnya harus terselenggara di lingkungan sekolah, tetapi juga pendidikan berkelanjutan seperti kursus-kursus, pelatihan kerja, pendidikan dalam jabatan dan sejenisnya (Suryadi,1997).

Pendidikan merupakan upaya untuk mengantarkan manusia kearah kedewasaan Melalui pendidikan masyarakat dapat kesempatan untuk membina kemampuan dan mengatur pola kehidupannya .Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia .

Menurut Todaro (1997) mengemukakan bahwa berbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi pendidikan yang dilakukan di negara-negara maju maupun di negara berkembang, pada awalnya menitikberatkan perhatian pada keterkaitan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan output. Hal ini tidak mengherankan karena sasaran utama pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimumkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, keterkaitan antara pendidikan dengan distribusi pendapatan dan usaha pengentasan kemiskinan absolut sempat terabaikan.

Mantra (2000) menyebutkan bahwa pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja harus selalu lentur dan berwawasan lingkungan agar pendidikan keterampilan dan keahlian dapat disesuaikan dengan kebutuhan terhadap jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang selalu berubah.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mempengaruhi manusia agar ia bersedia dan mampu mewujudkan apa yang ia pandang sebagai makna eksistensi manusia di dunia ini, manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbudi dan

bermasyarakat. Karena budi ini, manusia membudayakan hidup pribadinya dan turut hidup membudayakan masyarakatnya. Dengan demikian, terbina budi pekerti atau citra hidup pribadi seorang akan cara hidup masyarakat.

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Perubahan tuntutan yang terjadi dalam masyarakat, menghendaki peningkatan peranan pendidikan selanjutnya. Dengan demikian wajarlah kiranya batasan atas konsep mengenai pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan akibat dari perkembangan kehidupan manusia atau perkembangan peradaban manusia dan perkembangan masyarakat. Namun batasan pengertian yang dikembangkan oleh para ahli sejalan dengan kodrat manusia yang memainkan peranan rangkap dalam kehidupannya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.

Menurut Bellante dan Jackson (1990:72) tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi merupakan hasil sesuatu yang kompleks yaitu menyangkut kemampuan serta kepribadian, sementara pemilihan pekerjaan merupakan kompromi antara minat, kemampuan, nilai dan kesempatan.

Pada umumnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi pula tingkat pendapatan serta status sosial masyarakat tersebut. Perbedaan dalam pendidikan akan menyebabkan perbedaan keterampilan dan kemampuan serta akan dapat membedakan tingkat produktivitas seseorang, sekaligus menentukan hasil yang diperolehnya.

Schelle (dalam Esmara, 1986:12) mengemukakan tiga alasan utama mengapa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kinerja (prestasi kerja) seseorang. *Pertama*, tingkat pendidikan akan mempengaruhi produktivitas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan terbuka kesempatan yang lebih luas. *Ketiga*, lembaga-lembaga pendidikan dalam hal tertentu dapat berfungsi selaku badan penyalur tenaga kerja. Lebih lanjut Simanjuntak (1985:58) menjelaskan bahwa pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk investasi dalam upaya meningkatkan produktivitas (prestasi) seseorang.

Elfindri (2001:46) mengemukakan bahwa pendidikan juga akan berkaitan dengan pendapatan individual (prestasi). Dari segi lain peningkatan pendidikan

menghasilkan tingkat pendapatan, sekaligus akan membentuk pendapatan (prestasi). Pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi, juga berarti semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi tingkat penghasilan para pekerja.

Dalam arti sederhana pendidikan dimaksudkan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Langeved (dalam Hasbullah, 2003:2) pendidikan adalah: setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Selanjutnya menurut Rousseau (dalam Hasbullah, 2003:2) pendidikan adalah memberi perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Sejalan dengan ini, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tercantum pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku (tingkah laku) seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan latihan. Hasibuan (1997:76) menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan, sedang kan latihan bertujuan meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan bagi karyawan.

Mc Ctrand dalam Harsey dan Blanchard (1988:184) menyatakan tingkat pendidikan formal akan mempengaruhi kemampuan dan motivasi kerja. Prayitno, (2000:15) menyatakan pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu Prayitno (2000:12) mengemukakan pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama pengembangan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan suatu instansi sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan seseorang yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu.

Dari uraian definisi pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu mengandung beberapa ciri umum seperti berikut.

- a. Bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dari pendidik yang mempunyai tanggung jawab kepada masa depan peserta didik.
- b. Usaha itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengembangan diri individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang pribadi

dan sebagai seorang anggota masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.

- c. Dalam pencapaian tujuan pendidikan anak didik perlu diikutsertakan untuk terlibat secara aktif sepenuhnya.
- d. Pencapaian tujuan tersebut terlaksana dalam suatu proses dimana diperlukan bimbingan yang terencana, teratur dan sistematis.
- e. Kegiatan tersebut terselenggara dalam jalur pendidikan di sekolah dan pendidikan di luar sekolah.

Pendidikan seringkali menggambarkan berbagai hal yang paling essensial dari suatu masyarakat. Sistem pendidikan akan mencerminkan keadaan tersebut dalam bentuk terbatasnya jumlah orang yang bisa menikmati jenjang pendidikan tinggi. Dalam waktu yang bersamaan bidang pendidikan dapat pula mempengaruhi bentuk dan arah perkembangan suatu masyarakat di masa mendatang lewat berbagai jalan.

Menurut Todaro dalam Suparno (1997:84) berbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi pendidikan yang dilakukan di negara-negara maju maupun di negara berkembang, pada awalnya menitikberatkan perhatian pada keterkaitan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan output. Hal ini tidak mengherankan karena sasaran utama pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output total. Variabel pendidikan sangat erat kaitannya dengan motivasi seseorang dalam suatu pekerjaan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin besar pula motivasi orang tersebut untuk dapat memperoleh suatu

kedudukan yang lebih baik dalam suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan rendah. Pegawai yang berpendidikan cenderung motivasinya rendah pula untuk bekerja.

Untuk memajukan kehidupan manusia, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang dinamis dan bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas, baik lahiriah dan bantinhiah, duniawi dan ukrawi. Namun cita-cita demikian tidak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses pendidikan, karena proses pendidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang mencapai tujuan dan cita-cita tersebut.

Semakin tinggi cita-cita manusia, semakin menunjukkan kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-cita tersebut. Tetapi dibalik itu, karena semakin tinggi cita-cita yang diraih, maka semakin kompleks jiwa manusia itu, karena didorong oleh tuntutan hidup yang semakin meningkat pula. Itulah sebabnya pendidikan beserta lembaga-lembaga lainnya harus menjadi cermin dari cita-cita kelompok manusia disatu pihak dan pada waktu bersamaan.

Pendidikan sekaligus menjadi lembaga yang mampu mengubah dan meningkatkan cita-cita hidup kelompok manusia sehingga tidak terbelakang.

Idris (1992:4) mengemukakan pengertian pendidikan, bahwa pendidikan adalah serangkaian interaksi yang bertujuan antara manusia dewasa dan peserta didik

secara tatap muka atau menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan peserta didik seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensi semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa. Potensi disini adalah potensi fisik, emosi, sosial, sikap, moral, pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan adalah suatu tujuan yang ingin dicapai, sehingga diperlukan usaha terencana baik yang dilakukan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan dapat dibagi lagi ke dalam pendidikan formal, informal, dan non formal. Uraian masing-masingnya sebagai berikut.

- a. Pendidikan formal, adalah pendidikan yang mempunyai bentuk organisasi tertentu, seperti yang terdapat di sekolah.
- b. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah dalam lingkungan keluarga. Pendidikan ini berlangsung tanpa organisasi yakni tanpa orang tertentu yang diangkat atau ditunjuk ebagai pendidik, tanpa suatu program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tanpa evaluasi yang formal berbentuk ujian.
- c. Pendidikan nonformal yaitu meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar generasi muda dan juga orang dewasa, yang tidak dapat sepenuhnya mengikuti pendidikan sekolah, dapat memiliki pengetahuan praktis dan keterampilan dasar yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif.

Selanjutnya Idris dan Jamal (1992:30-31) mengemukakan tujuan pendidikan, sebagai berikut.

- a. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan seluruh proses pendidikan yang berlandaskan pada falsafah hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan GBHN, yaitu bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, menumbuhkan sikap demokratis, mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan sebagainya.
- b. Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu.

- c. Tujuan instruksional, rumusan tentang apa saja yang harus diterima dan diketahui oleh peserta didik sesudah ia mengikuti kegiatan pengajaran sesuai dengan pokok bahasan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini akan mendorong peningkatan output yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga/rumahtangga.

2.3.2 Budaya Kerja

Menurut Paramita (1986:46) budaya kerja dapat dibagi menjadi 2 yakni sikap terhadap pekerjaan dan perilaku pada waktu bekerja. **Sikap terhadap pekerjaan**, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. **Perilaku pada waktu bekerja**, dapat diwujudkan seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan, atau sebaliknya.

Sikap maupun perilaku kerja tersebut terbentuk baik di dalam masyarakat maupun di dalam organisasi atau perusahaan. Sudah barang tentu warna *budaya kerja* sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat (makro) atau budaya organisasi (perusahaan) yang bersangkutan.

Variabel budaya kerja yang diartikan sebagai etos kerja yang sangat erat kaitannya dengan lama jam kerja seseorang dalam melakukan pekerjaan (mencari nafkah) menjadi suatu variabel yang diduga dapat membentuk suatu keluarga menjadi miskin. Artinya, semakin lama seseorang melakukan aktivitas mencari nafkah maka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar akan mereka dapatkan. Jadi, budaya kerja dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tinggi rendahnya etos kerja seseorang.

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS (2003) menunjukkan bahwa dari seluruh kepala keluarga miskin sebanyak 75,76 persen hanya melakukan kegiatan bekerja atau memiliki budaya kerja yang kurang dari 37,5 jam per minggu. Sedangkan kepala keluarga yang melakukan kegiatan bekerja atau memiliki budaya kerja 37,5 jam ke atas per minggu dan tergolong miskin hanya tercatat sebanyak 24,24 persen.

2.2.3 Luas Penguasaan Lahan

Di Negara – Negara Agraris termasuk Indonesia lahan dijadikan modal utama bagi kelangsungan kegiatan pertanian ,bahkan bagi yang tidak memiliki keterbatasan kepemilikan lahan di suatu desa akan berdampak terhadap status sosial seseorang di mata masyarakat ,karena produksi pertanian masih ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki.

Kondisi seperti di atas masih di rasa sangat rentan sekali dengan keberadaan masyarakat miskin di pedesaan karena pada umumnya masyarakat miskin di pedesaan bekerja disektor pertanian ,baik langsung maupun tidak

langsung .Dalam melakukan kegiatan usaha maka yang menjadi salah satu faktor produksi adalah lahan, oleh karena itu penguasaan lahan petani baik melalui kepemilikan maupun sewa bagi hasil menjadi sangat penting bagi masyarakat pedesaan.

Menurut Mintoro (1983,47) penguasaan lahan akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang di terima Rumah Tangga dari berbagai sumber. Secara teoritis penguasaan lahan mempunyai hubungan yang bersifat teknis fungsional dengan tingkat produksi ,penguasaan dengan luas tertentu sangat menentukan pencapaian produksi yang maksimal, hubungan luas lahan dengan produksi bersifat postifi ,dimana penguasaan lahan yang makin luas akan menyebabkan peningkatan produksi begitu juga sebaliknya. Tinggi rendahnya tingkat produksi pertanian pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh mankin tinggi produksi maka mankin tinggi juga pendapatan yang diterima sebagai balas jasa produksi ``*Ceteris Paribus*``.

Sumatera Barat yang merupakan daerah agraris, dimana sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian yang paling dominan, lahan menjadi salah satu modal utama dalam struktur perekonomian di Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya tidak seluruh masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian memmiliki lahan yang memadai. Tidak sedikit masyarakat yang bekerja di sektor pertanian hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar.

Dengan bermodalkan lahan yang sangat sempit dan komoditi yang diusahakan adalah komoditi yang tidak untuk diekspor yang notabene merupakan

komoditi dengan nilai tambah rendah, maka pendapatan yang diperoleh masyarakat petani relatif rendah.

Salah satu ciri penduduk miskin di Sumatera Barat adalah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang cukup rendah. Kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan pertanian bukan tidak dibarengi dengan skill yang baik, namun karena lahan yang mereka kuasai relatif kecil (kurang dari 0,5 Ha).

Kemiskinan yang dialami masyarakat Sumatera Barat terutama masyarakat pertanian selain lahan yang mereka kuasai sangat sempit juga diperburuk dengan harga pupuk yang cukup tinggi serta harga komoditi padi yang tidak berpihak kepada mereka.

Namun demikian, bagi masyarakat pertanian yang memiliki luas lahan yang cukup mereka dapat mengusahakan lahannya dengan berbagai komoditi pertanian lain seperti komoditi perkebunan (karet, kopi dll). Untuk kelompok masyarakat pertanian tersebut taraf kehidupannya relatif cukup baik dan jarang yang terjerumus ke dalam jurang kemiskinan, karena hasil yang diperoleh sebanding dengan luas lahan yang dikuasai dan pendapatan dari komoditi lain sangat menunjang kehidupannya.

2.2.4 Akses Informasi

Informasi akan dapat diakses apabila diantara pemberi dan penerima informasi dapat melakukan komunikasi, karena fungsi komunikasi menurut Mulyana (2004;5) sebagai komunikasi sosial yang setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri,

kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan.

Lebih lanjut Mulyana (2004;5) mengatakan bahwa orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesama manusia bisa dipastikan akan tersesat, karena tidak berkesempatan menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS (2003) menunjukkan bahwa dari seluruh kepala keluarga miskin sebanyak 74,99 persen menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dari luar. Sedangkan kepala keluarga yang tergolong mudah mengakses informasi dan tergolong miskin hanya tercatat sebanyak 25,01 persen.

Sarana untuk penyampaian informasi dapat dilakukan dengan dua jalur yakni dari pihak pemberi informasi dan pihak yang menerima informasi. Berkembangnya pesawat telepon sampai ke daerah pedesaan diharapkan akan menjadi salah satu sarana penyebar informasi yang paling efektif.

Informasi yang disampaikan dapat berupa informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya dapat juga merupakan informasi yang berkaitan dengan usaha masyarakat di suatu daerah.

Tidak semua masyarakat di Sumatera Barat dapat memanfaatkan sarana informasi yang sudah berkembang saat ini. Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan apakah suatu rumahtangga sudah merasa perlu memiliki sarana informasi atau belum. Bagi yang memiliki kemampuan untuk memiliki sarana telepon tentunya akan berdampak semakin luas wawasan yang dimiliki. Tetapi bagi mereka yang belum mampu untuk memiliki sarana informasi tersebut maka mereka akan sedikit

kesulitan dalam menambah wawasan dan menerima informasi/perkembangan pembangunan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup menarik untuk dianalisis penyebabnya dan penanggulangannya. Beberapa peneliti telah melakukan analisis tersebut. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Muchlis Syirat (2007) dalam penyelesaian studinya di Pascasarjana Universitas Andalas Padang telah melakukan penelitian tentang kemiskinan dengan judul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumahtangga miskin perkotaan di Sumatera Barat.

Dalam penelitian tersebut diduga tingkat pendidikan kepala rumahtangga, status pekerjaan dan ukuran keluarga merupakan variabel yang berpengaruh terhadap pola konsumsi rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Untuk membuktikan penelitian tersebut digunakan metode penghitungan dengan formula Regresi Logistik.

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada rumahtangga dengan pengeluaran kategori rendah tingkat pendidikan kepala rumahtangga dan status pekerjaan kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Pada kelompok rumahtangga dengan pengeluaran kategori **sedang**, pendidikan kepala keluarga dan ukuran keluarga berpengaruh signifikan pada pola konsumsi rumahtangga miskin

perkotaan. Sedangkan status pekerjaan kepala keluarga pengaruhnya tidak signifikan

Pada kelompok rumahtangga dengan pengeluaran kategori **tinggi**, hanya ukuran keluarga yang berpengaruh signifikan pada pola konsumsi rumahtangga miskin perkotaan. Sedangkan pendidikan dan status pekerjaan kepala keluarga pengaruhnya tidak signifikan.

Suherman (2004) dalam penyelesaian pendidikannya melakukan penelitian tentang kemiskinan yang berjudul “Karakteristik keluarga miskin dan analisis program pemberdayaan masyarakat pedesaan (studi kasus pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Candung Kabupaten Agam)”.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa karakteristik penduduk miskin di Kecamatan Candung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian kepala keluarga memiliki pekerjaan sebagai pekerja kasar.

Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat (2004) dengan judul tesis “Analisis Pengaruh Faktor-faktor Rumahtangga terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat”. Penelitian tersebut menerapkan metodologi Regresi Logistik.

Variabel yang diteliti adalah jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, jenis kelamin kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, lapangan pekerjaan kepala keluarga, kepemilikan lahan rumahtangga dan lokasi tempat tinggal rumahtangga (pedesaan atau perkotaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat.

2.5 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Dibandingkan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang telah diuraikan di atas terdapat pada variabel bebas terikat. Pada penelitian terdahulu, variabel terikat adalah pola konsumsi rumahtangga miskin sedangkan pada penelitian ini variabel terikat adalah rumahtangga miskin dengan focus pada factor-faktor sebagai penyebab terjadinya kemiskinan.

Selain itu, pada penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah tingkat pendidikan kepala rumahtangga, budaya kerja kepala rumahtangga, luas lahan yang dimiliki kepala rumahtangga dan akses terhadap informasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Muchlis Sjirat variabel bebas yang diteliti adalah tingkat pendidikan kepala rumahtangga, status pekerjaan kepala rumahtangga (formal dan informal) dan jumlah anggota rumahtangga miskin.

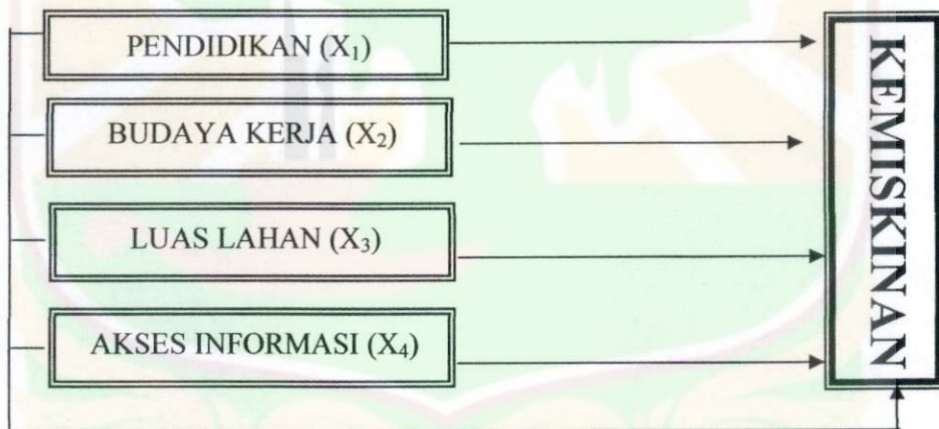
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Suherman terletak pada variabel bebas yang diteliti. Pada penelitian Suherman variabel bebas yang diteliti adalah jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, jenis kelamin kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, lapangan pekerjaan kepala keluarga, kepemilikan lahan rumahtangga dan lokasi tempat tinggal rumahtangga (pedesaan atau perkotaan).

2.6 Kerangka Analisa

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor saling terkait. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab

kemiskinan memang cukup banyak, tetapi dalam penelitian ini faktor penyebab tersebut dibatasi pada beberapa variabel.

Faktor pertama yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan, dimana dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung akan membentuk daya kreatifitas masyarakat menjadi rendah sehingga wawasan mereka menjadi rendah pula dan pada akhirnya akan mempersempit upaya mereka untuk melakukan aktifitas bekerja yang lebih produktif. Artinya, kemauan mereka untuk meningkatkan pendapatan menjadi tidak berkembang. Dengan kondisi demikian kehidupan mereka akan menghadapi kesulitan untuk mengimbangi kebutuhan hidup yang terus berkembang.



Gambar 3.1 : Kerangka Pemikiran Penyebab Kemiskinan

Padahal, jika penduduk memiliki pendidikan yang tinggi maka akan dapat melakukan produksi yang makin efisien, dimana dengan efisiensi ini pada akhirnya akan dapat diciptakan produktivitas yang tinggi dan akan dapat meningkatkan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu faktor pendidikan pada gilirannya akan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Jam kerja, merupakan faktor kedua yang dapat mempengaruhi kemiskinan, dimana dengan jam kerja yang masih rendah yakni jam kerja di bawah normal (37,5 jam perminggu) mengakibatkan tingkat pendapatan mereka juga menjadi rendah yang pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian semakin rendah rata-rata jam kerja yang dilakukan oleh penduduk maka akan semakin banyak penduduk miskin. Untuk itu, jam kerja dalam hal ini dapat mempengaruhi kemiskinan.

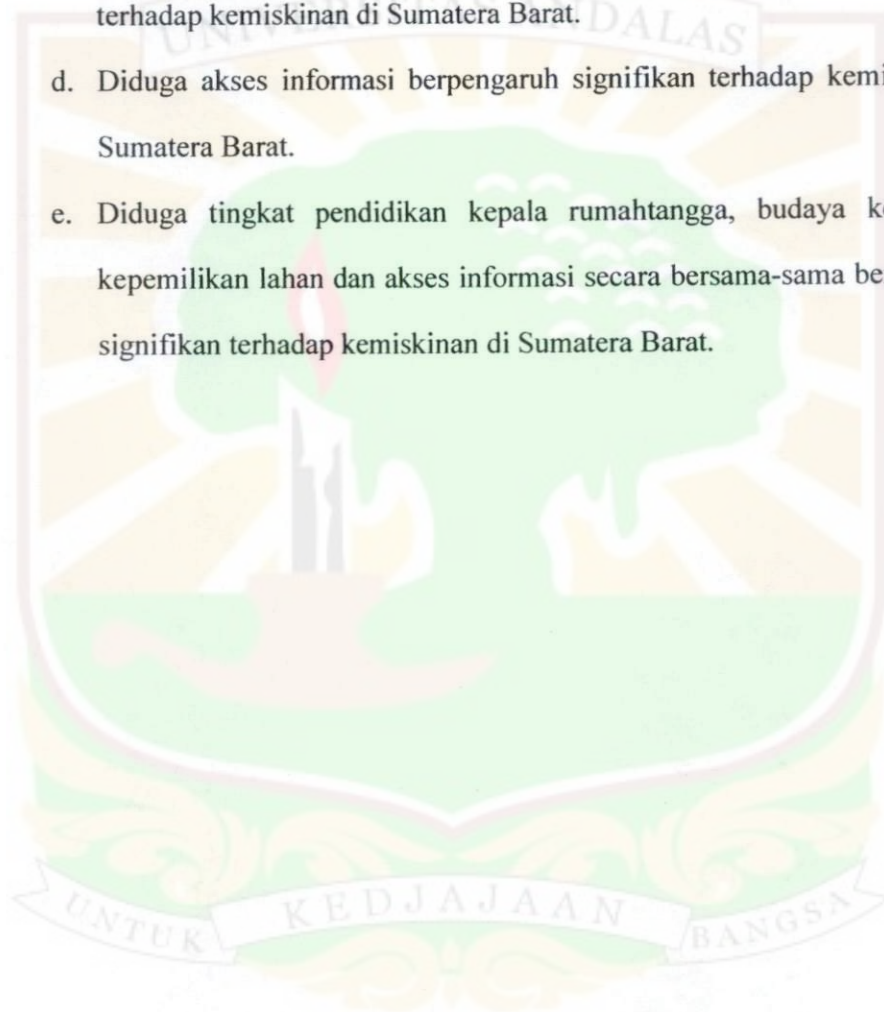
Penguasaan lahan merupakan faktor produksi yang penting bagi rumah tangga karena pada umumnya rumah tangga miskin mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Luas lahan produktif yang dimiliki merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kemiskinan, sekalipun jam kerja mereka sangat tinggi (diatas jam kerja normal) namun jika tidak ditunjang dengan modal yang cukup seperti lahan produktif yang sempit maka mereka akan kesulitan dalam meningkatkan produktivitas.

Kemajuan yang dicapai oleh sekelompok penduduk tidak terlepas dari adanya perkembangan informasi. Dengan adanya perkembangan media informasi baik media elektronika maupun media cetak dapat meningkatkan wawasan penduduk. Namun, tidak seluruh daerah dapat dengan mudah menerima informasi tersebut karena berbagai kendala seperti terisolasinya suatu daerah karena daerah tersebut berada pada lokasi yang sulit dijangkau, atau bisa saja masyarakat belum memandang pentingnya informasi. Alat (media) informasi yang dimaksud dalam penelitian ini seperti majalah, koran, radio, televisi maupun telepon.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah selanjutnya hipotesa yang dapat dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diduga tingkat pendidikan kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
- b. Diduga budaya kerja kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
- c. Diduga luas kepemilikan lahan rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
- d. Diduga akses informasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
- e. Diduga tingkat pendidikan kepala rumahtangga, budaya kerja, luas kepemilikan lahan dan akses informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Kemiskinan di Sumatera Barat seperti halnya terjadi di Indonesia, jumlahnya relatif masih cukup besar. Kemiskinan bahkan menjadi sasaran utama pembangunan di Sumatera Barat. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, namun upaya tersebut nampaknya masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terbukti jumlah penduduk miskin masih terus bertambah.

Penelitian ini difokuskan pada seluruh rumahtangga yang berdomisili di Propinsi Sumatera Barat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dipilihnya lokasi penelitian di Propinsi Sumatera Barat mengingat ketersediaan data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang telah dilakukan oleh BPS Propinsi Sumatera Barat.

Pemilihan sampel rumahtangga susenas di Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan *Multistage sampling* dimana pertama kali dilakukan pengambilan sampel terhadap Blok Sensus di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Setelah dilaksanakan pendaftaran rumahtangga pada masing-masing Blok Sensus, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel tahap kedua yakni pengambilan sampel rumahtangga pada masing-masing Blok Sensus sebanyak 16 rumahtangga dari setiap Blok Sensus.

Jumlah Blok Sensus di Sumatera Barat pada tahun 2005 terpilih sebanyak 662 Blok Sensus yang terdiri atas 436 Blok Sensus di Pedesaan dan sebanyak 226 Blok Sensus di Perkotaan.

Tabel 3.1. Distribusi Sampel Blok Sensus dan Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Blok Sensus Terpilih			Rumahtangga Terpilih		
		Pedesaan	Perkotaan	Jumlah	Pedesaan	Perkotaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kep. Mentawai	22	4	26	352	64	416
2	Kab. Pess Selatan	32	4	36	512	64	576
3	Kab. Solok	39	3	42	624	48	672
4	Kab. Swl/Sijunjung	28	2	30	448	32	480
5	Kab. Tanah Datar	34	4	38	544	64	608
6	Kab. Pdg Pariaman	30	5	35	480	80	560
7	Kab. Agam	29	7	36	464	112	576
8	Kab. 50 Kota	37	1	38	592	16	608
9	Kab. Pasaman	36	4	40	576	64	640
10	Kab. Solok Sltm	35	3	38	560	48	608
11	Kab. Dharmasraya	35	3	38	560	48	608
12	Kab. Pasaman Barat	32	4	36	512	64	576
13	Kota Padang	0	49	49	0	784	784
14	Kota Solok	7	21	28	112	336	448
15	Kota Sawahlunto	12	16	28	192	256	448
16	Kota Pdg Panjang	3	23	26	48	368	416
17	Kota Bukittinggi	0	30	30	0	480	480
18	Kota Payakumbuh	10	20	30	160	320	480
19	Kota Pariaman	15	23	38	240	368	608
	Sumatera Barat	436	226	662	6976	3616	10592

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Barat

Dengan komposisi jumlah sampel Blok Sensus seperti di atas, maka distribusi sampel rumahtangga untuk daerah Pedesaan sebanyak 6.976 rumahtangga dan di perkotaan sebanyak 3.616 rumahtangga.

3.2 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada tahun 2005 oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat.

Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, yang setiap tahun melaksanakan Susenas. Digunakannya data hasil Susenas 2005 karena pada tahun tersebut pendataan difokuskan pada modul pengeluaran yang sangat erat kaitannya dengan penghitungan penduduk dan rumahtangga miskin.

3.3 Metode Analisa Data

Penelitian dilakukan dengan metode analisa deskriptif, yang diharapkan dari penyajiannya akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti.

Diharapkan dengan pendekatan tersebut penelitian ini akan dapat mengungkapkan kaitan antar berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah rumahtangga miskin di daerah pedesaan dan perkotaan di Propinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk menjawab hipotesa pada penelitian ini selanjutnya dilakukan penghitungan regresi, ditujukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel pendidikan kepala rumahtangga, budaya kerja, luas kepemilikan lahan dan akses informasi terhadap kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat. Analisis ini menggunakan analisis *Logistic Regresision Model* untuk

menunjukkan probabilitas suatu rumah tangga miskin. Probabilitas ini didasarkan pada asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk *logistic distribution function model*. Ini telah digunakan Ghaiha (1985) untuk studinya tentang kemiskinan di India dan Amar (2000) dalam penelitian analisis kemiskinan pedesaan di Sumatera Barat. Menurut Gujarati (1993) Logistik Model berasal dari *Logistic Distribution Function* dengan persamaan :

$$P_i = EY = 1/X_i = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_p X_p)}} \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan (1) di atas kemudian di sederhanakan menjadi :

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \dots\dots\dots(2)$$

Sofyardi (2007;6) mengemukakan agar persamaan (2) dapat diestimasi, maka persamaan tersebut dimanipulasi dengan cara mengalikan dengan $1+e^{-z}$ pada kedua sisinya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$(1 + e^{-Z_i}) P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \times (1 + e^{-Z_i}) \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{atau } (1 + e^{-Z_i}) P_i = 1$$

$$\frac{(1 + e^{-Z_i}) P_i}{P_i - 1} = \frac{1}{P_i - 1} \dots\dots\dots(4)$$

Sehingga,

$$e^{Z_i} = \frac{P_i}{1 - P_i} \dots\dots\dots(5)$$

Karena *range* P_1 berkisar antara 0 – 1 dan P_1 berhubungan secara non linear dengan Z_i jika P_1 merupakan notasi untuk rumah tangga yang berstatus miskin maka $1 - P_1$ merupakan notasi rumah tangga yang miskin. Peluang bagi suatu rumah tangga miskin adalah :

$$1 - P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \dots\dots\dots(6)$$

Dengan model statistik *Odds Ratio* dengan menggabungkan persamaan (5) dengan persamaan (6) diperoleh persamaan baru sehingga persamaan baru dapat ditulis menjadi :

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = \frac{1 + e^{Z_i}}{1 + e^{-Z_i}} = e^{Z_i} \dots\dots\dots(7)$$

Persamaan (7) selanjutnya ditransformasikan menjadi model logaritma natural sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = Z_i \dots\dots\dots(8)$$

Berdasarkan persamaan diatas maka yang menjadi model spesifik dalam penelitian ini adalah :

$$L_i = \ln \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots(9)$$

dimana,

$$\left(\frac{P_i}{1 - P_j} \right) = \text{Kemungkinan rumahtangga dalam pola konsumsi tertentu}$$

β_0 = Konstanta

X_1 = Pendidikan yang diukur dengan tingkat pendidikan kepala keluarga

0 = Pendidikan SLTP ke bawah

1 = Pendidikan SLTA ke atas

X_2 = Budaya kerja yang digambarkan melalui jam kerja perminggu

0 = Jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu

1 = Jumlah jam 35 jam atau lebih perminggu

X_3 = Luas kepemilikan lahan

0 = jika luas lahan kurang dari 0,25 Ha

1 = jika luas lahan 0,25 Ha atau lebih

X_4 = Akses informasi

0 = jika rumahtangga kesulitan dalam akses informasi

1 = jika rumahtangga tidak kesulitan dalam akses informasi

ϵ_i = Kesalahan pengganggu

Untuk lebih meyakinkan hasil penghitungan regresi di atas selanjutnya dilakukan uji statistik. Model di atas akan diestimasi dengan pendekatan maximum *likelihood* menggunakan program SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji sebagai berikut:

a. Uji Wald Test :

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu (parsial) terhadap variabel terikat. Wald Test ini dilakukan dengan membandingkan nilai Wald Test dengan nilai t tabel. Nilai t tabel didapat dengan cara $N - df$ dengan tingkat kepercayaan (α) 0,05 dan untuk menghitung t-test diperoleh dengan rumus :

$$\text{Wald Test} = \left(\frac{\beta_i}{\text{Se}\beta_i} \right)^2$$

Dimana,

β_i = Koefisien Regresi

$\text{Se}\beta_i$ = Standar Error β_i

Uji χ^2 (Chi Square test) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Uji χ^2 dilakukan dengan membandingkan nilai χ^2 hitung dengan χ^2 tabel. Dengan derajat kebebasan sebanyak variabel bebas dan tingkat kepercayaan (α) 0,05. Jika nilai χ^2 hitung lebih besar dari nilai χ^2 tabel maka secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya bila nilai χ^2 hitung lebih kecil dari nilai χ^2 tabel maka secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Adapun untuk mendapatkan nilai χ^2 hitung digunakan rumus sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{t=1}^G Ni \frac{(Pi - Pn)^2}{Pn(1 - Pn)}$$

Dimana,

χ^2 = Chi Square

Ni = Frekuensi pada masing-masing variabel

Pi = Probabilitas yang aktual/diteliti

Pn = Probabilitas yang diharapkan

G = Jumlah variabel

b. Uji Odds Ratio :

Uji *odds ratio* digunakan untuk mengetahui sebuah rumahtangga berstatus miskin atau tidak miskin dengan menggunakan persamaan :

$$OR = e^{bi}$$

Dimana,

OR = Odd Ratio

e = Log Natural yang bernilai 2,71828

bi = Koefisien Logistik variabel ke-i

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yang terdiri atas:

a. Rumahtangga Miskin

Yaitu rumahtangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan minimum) sehari-sehari. Atau rumahtangga yang berada di

bawah garis kemiskinan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumahtangga. Dalam hal ini pengukuran kemiskinan mengacu pada pendekatan rata-rata pengeluaran rumahtangga perbulan. Selanjutnya, dari rata-rata pengeluaran per bulan tersebut dibandingkan dengan garis kemiskinan sehingga akan diperoleh data rumahtangga yang miskin dan yang tidak miskin di Sumatera Barat.

Dalam rangka menentukan rumahtangga miskin, ditentukan berdasarkan batas kecukupan/garis kemiskinan perkapita perbulan. Untuk daerah perkotaan garis kemiskinan ditentukan sebesar Rp.204.521,- perkapita/bulan. Sedangkan di daerah pedesaan sebesar Rp.150.187,- perkapita perbulan. Selanjutnya dengan menggunakan *dummy variable* untuk rumahtangga miskin diberi skor 0 (nol) dan rumahtangga yang tidak miskin diberi skor 1 (satu).

b. Tingkat Pendidikan Kepala Rumahtangga

Yaitu tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumahtangga. Dalam penelitian ini pendidikan kepala rumahtangga akan difokuskan pada :

- Kepala Rumahtangga dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah (pendidikan rendah)
- Kepala Keluarga dengan pendidikan SLTA ke atas yang dikategorikan sebagai pendidikan tinggi.

Selanjutnya untuk keperluan penghitungan regresi logistik tingkat pendidikan kepala rumahtangga SLTA ke atas diberi kode 1 dan untuk pendidikan kepala rumahtangga SLTP ke bawah diberi kode 0.

c. Budaya Kerja atau Jam Kerja (X_3)

Dalam konsep BPS (1990) jam kerja adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan mencari nafkah/pendapatan selama seminggu. Jam kerja normal adalah selama 35 jam perminggu, sehingga bagi kepala rumahtangga yang memiliki jam kerja di bawah itu, merupakan kepala rumahtangga yang memiliki budaya kerja rendah. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jam. Dengan menggunakan variabel dummy, maka untuk rumahtangga yang melakukan pekerjaan selama 35 jam ke atas dalam seminggu diberi skor 1 (satu), sedangkan kepala rumahtangga yang melakukan pekerjaan kurang dari 35 jam perminggu diberi skor 0 (nol).

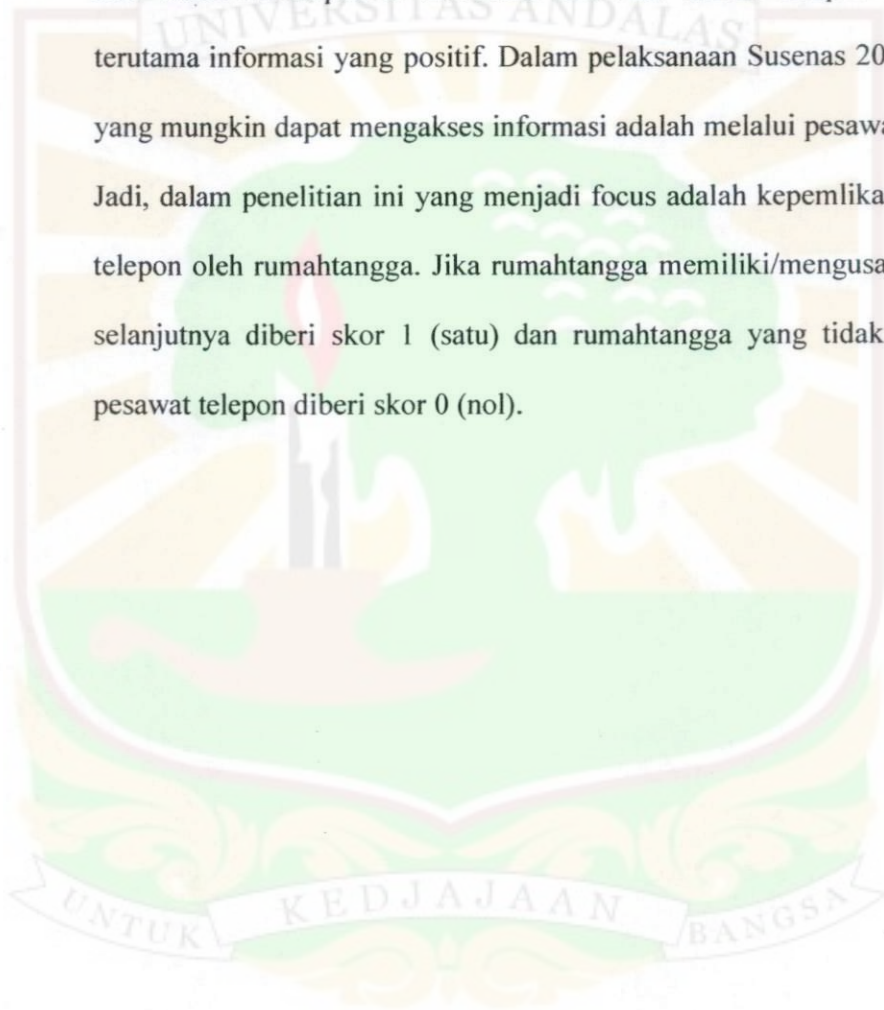
d. Luas Kepemilikan Lahan (X_4)

Luas kepemilikan lahan adalah luas lahan produktif yang dapat diusahakan untuk memperoleh pendapatan dan dimiliki atau dikuasai oleh kepala rumahtangga. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah hektar. Dengan menggunakan dummy variabel, maka untuk rumahtangga yang memiliki/menguasai lahan produktif 0,25 hektar ke atas selanjutnya diberi

skor 1 (satu), sedangkan untuk rumahtangga yang memiliki/menguasai lahan kurang dari 0,25 hektar selanjutnya diberi skor 0 (nol).

e. Akses terhadap Sumber Informasi (X₅)

Yaitu kemudahan rumahtangga/masyarakat terhadap penyerapan informasi atau untuk mendapatkan informasi dari luar daerah tempat tinggalnya terutama informasi yang positif. Dalam pelaksanaan Susenas 2005, media yang mungkin dapat mengakses informasi adalah melalui pesawat telepon. Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi focus adalah kepemilikan pesawat telepon oleh rumahtangga. Jika rumahtangga memiliki/mengusasi telepon selanjutnya diberi skor 1 (satu) dan rumahtangga yang tidak memiliki pesawat telepon diberi skor 0 (nol).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Komposisi Penduduk Sumatera Barat

Penduduk merupakan obyek dan subyek pembangunan, karena pada dasarnya hasil pembangunan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri dilakukan oleh penduduk.

Jumlah penduduk yang besar disatu sisi dapat dijadikan sebagai modal untuk pelaksanaan pembangunan dengan syarat mayoritas dari penduduk memiliki kualitas yang baik. Namun, jumlah penduduk yang besar di sisi lain dapat menjadi beban pembangunan jika penduduk tersebut kurang berkualitas. Jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005 tercatat sebanyak 4,6 juta orang yang tersebar di daerah perkotaan dan pedesaan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2000 yang tercatat sebesar 4,2 juta orang, selama periode 2000-2005 jumlah penduduk Sumatera Barat mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,84 persen pertahun.

Selanjutnya jika penduduk Sumatera Barat dirinci menurut jenis kelamin, sampai dengan tahun 2005 penduduk perempuan relatif masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.256.969 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 2.346.988 jiwa.

Tabel 4.1. Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur Tahun 2005

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	233.615	211.084	444.699	110,67
5 - 9	266.170	245.379	511.549	108,47
10-14	247.977	241.735	489.712	102,58
15-19	229.751	224.897	454.648	102,16
20-24	187.840	201.650	389.490	93,15
25-29	163.518	183.723	347.241	89,00
30-34	150.544	167.152	317.696	90,06
35-39	144.241	160.502	304.743	89,87
40-44	136.095	148.338	284.433	91,75
45-49	130.242	145.122	275.364	89,75
50-54	117.342	116.881	234.223	100,39
55-59	67.755	66.026	133.781	102,62
60-64	63.670	72.322	135.992	88,04
65+	118.209	162.177	280.386	72,89
Jumlah	2.256.969	2.346.988	4.603.957	96,16

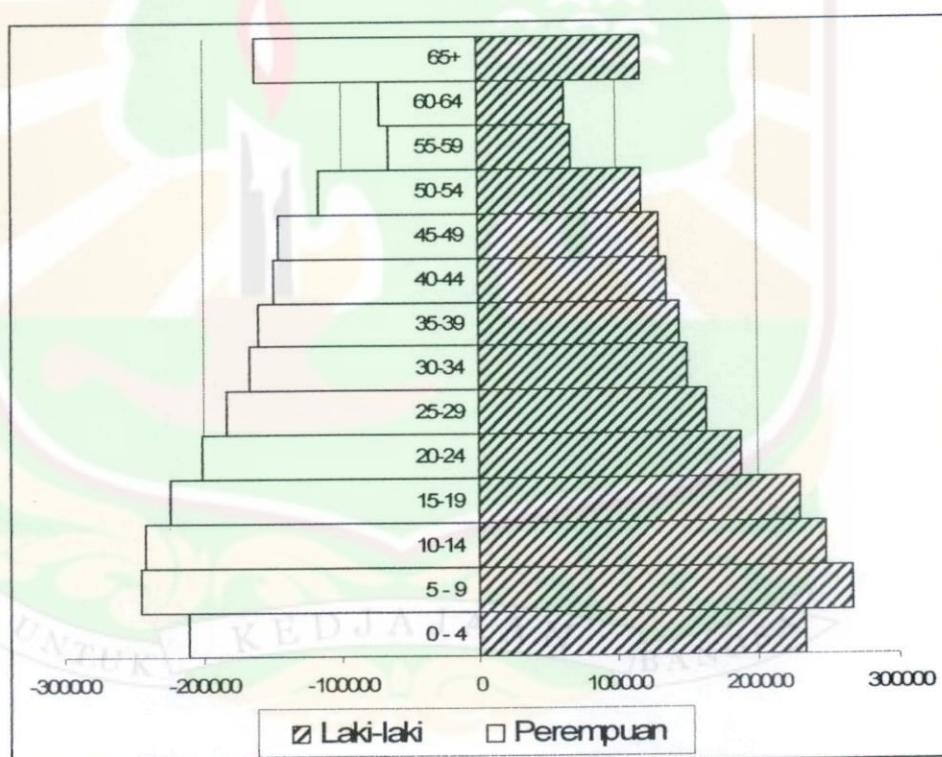
Sumber : BPS, hasil Susenas 2005

Jika penduduk Sumatera Barat dilihat dari struktur kelompok umur tampak bahwa pada usia 19 tahun ke bawah jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin yang cenderung di atas angka 100. Sementara itu, pada kelompok umur 20 tahun sampai dengan 49 tahun jumlah penduduk laki-laki jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang ditunjukkan

dengan rasio jenis kelamin yang tercatat di bawah 100 bahkan mencapai angka sebesar 89,00.

Selanjutnya, pada kelompok umur 50 sampai dengan 64 tahun jumlah penduduk laki-laki kembali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin yang cenderung di atas 100. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penduduk Sumatera Barat terutama pada usia 20 tahun ke atas masih banyak yang suka merantau dan pada usia tertentu terutama pada usia 50 tahun ke atas mereka kembali lagi ke kampung halamannya.

Gambar 4.1. Pyramida Penduduk Sumatera Barat Tahun 2005



Sejalan dengan kondisi daerah Sumatera Barat yang mayoritas masih merupakan daerah agraris, maka komposisi jumlah penduduk di Sumatera Barat

masih lebih banyak berdomisili di daerah pedesaan. Dari seluruh jumlah penduduk yang berdomisili di daerah perkotaan hanya tercatat sebanyak 1,4 juta orang atau hanya 30,77 persen sedangkan sisanya yakni sebanyak 3,2 juta orang atau sekitar 69,23 persen berdomisili di daerah pedesaan.

Tabel 4.2. Penduduk Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2005

Kelompok Umur	Daerah		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	412.039 (29,08)	1.033.921 (32,44)	1.445.960 (31,41)
15 - 64	933.133 (65,87)	1.944.478 (61,01)	2.877.611 (62,50)
65 +	71.547 (5,05)	208.839 (6,55)	280.386 (6,09)
Jumlah	1.416.719 (100,00)	3.187.238 (100,00)	4.603.957 (100,00)

Sumber : BPS, hasil Susenas 2005

Masih banyaknya penduduk Sumatera Barat yang berdomisili di daerah Pedesaan memberikan gambaran dua kemungkinan. **Pertama**, terdapat dugaan bagi sebagian besar penduduk, daerah Perkotaan merupakan daerah yang belum memiliki daya pikat yang cukup kuat untuk dijadikan tempat tinggal sehingga mereka lebih baik tinggal di Pedesaan. **Kedua**, daerah perkotaan mungkin saja memiliki daya tarik untuk penduduk pedesaan, namun penduduk pedesaan tidak mendapat tempat di daerah perkotaan karena keterbatasan keahlian dan rendahnya pendidikan yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan di

perkotaan. Sekalipun mereka memaksakan diri untuk tinggal di perkotaan kebanyakan dari mereka hanya bisa hidup di bawah garis kemiskinan.

Selanjutnya, apabila jumlah penduduk Sumatera Barat dilihat menurut kelompok umur, kebanyakan penduduk perkotaan adalah kelompok penduduk dengan kelompok umur produktif (15-64 tahun). Seperti tampak pada Gambar 4.1 persentase penduduk kelompok umur produktif di Perkotaan tercatat sebanyak 65,87 persen. Sementara itu, penduduk pada kelompok umur yang sama di Pedesaan sedikit lebih rendah daripada di perkotaan yakni hanya sebanyak 61,01 persen.

Sementara itu, penduduk kelompok umur tidak produktif lagi yakni pada kelompok usia 65 tahun ke atas lebih banyak berdomisili di daerah pedesaan. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada kelompok umur tersebut penduduk Sumatera Barat tampaknya lebih banyak memilih daerah pedesaan untuk menjalani sisa-sisa hidup mereka ketimbang berdomisili di daerah perkotaan yang penuh dengan kebisingan. Sementara di daerah pedesaan mayoritas daerahnya relatif lebih tenang dibandingkan dengan perkotaan.

4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan dan Rumah tangga Miskin

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki sebuah persoalan kemiskinan. Setelah sekian kali melakukan upaya berperang melawan kemiskinan, sampai sekarang pemerintah masih belum mendapatkan *grand strategy* guna membebaskan lebih dari 30 juta rakyat Indonesia yang menderita karena tekanan ekonomi. Cara yang ideal untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mestinya di atasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun

tanpa putus belum terlaksana dengan baik sehingga untuk mencapai angka yang minimal belum juga terwujud.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang masih harus bekerja keras guna menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap rumahtangga.

4.2.1 Garis Kemiskinan

Dalam kajian tentang kemiskinan sering muncul istilah penduduk miskin, rumahtangga miskin, kemiskinan pedesaan dan kemiskinan perkotaan. Semua istilah ini sering digunakan dalam satu pengertian yang maksudnya adalah penduduk atau rumahtangga yang menderita kemiskinan. Untuk membedakan penduduk atau rumahtangga miskin dengan penduduk atau rumahtangga yang tidak miskin biasanya digunakan garis pembatas yang disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk atau rumahtangga yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk atau rumahtangga miskin.

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran konsumsi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ditunjukkan dalam sejumlah rupiah/kapita/bulan (BPS,1990) dan garis kemiskinan adalah angka absolut. Apabila tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi hidup minimumnya ini yang disebut kemiskinan absolut.

Konsep dasar ukuran kemiskinan berhubungan dengan pengeluaran kebutuhan dasar minimum rata rata seorang individu hidup normal. Kebutuhan dasar termasuk pilihan makanan dasar dan golongan bukan makanan. Jika seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa individu tersebut dapat di kategorikan miskin. Jumlah pengeluaran dapat digunakan batas antara miskin dan tidak miskin. Batas ini disebut juga dengan garis kemiskinan. Menurut konsep pengeluaran yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan dinyatakan dengan besaran rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori perkapita perhari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. Besarnya pengeluaran per kapita yang ditentukan sebagai garis kemiskinan dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 4.3. Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat tinggal Tahun 2005

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	112.512	81.568	86.497
2002	145.673	109.991	122.506
2005	204.521	150.187	169.887

Sumber : BPS, berbagai publikasi

Garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. Seperti tampak pada Tabel 4.3 di atas, garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan senantiasa

mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp.112.512,- perkapita perbulan sedangkan di pedesaan tercatat sebesar Rp.81.568,- perkapita perbulan. Krisis ekonomi yang terjadi pada medio tahun 1997 merupakan era mulainya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak tinggi sehingga garis kemiskinan yang tercatat pada tahun 1999 relatif cukup tinggi.

Pada tahun 2002 kenaikan harga kebutuhan pokok masih terus berlangsung dan akibatnya biaya yang harus dikeluarkan rumahtangga sudah barang tentu mengalami peningkatan. Meningkatnya kebutuhan pokok terutama kebutuhan 9 bahan pokok secara langsung juga berakibat pada bergesernya garis kemiskinan. Pada tahun 2002 garis kemiskinan menjadi sebesar Rp.145.673,- per orang per bulan di daerah perkotaan dan sebesar Rp.109.991,- per orang perbulan di daerah pedesaan.

Memasuki tahun 2005, Pemerintah masih belum juga dapat menekan laju kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Dengan adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap meningkatnya garis kemiskinan. Hal ini tampak pada tahun 2005 dimana garis kemiskinan di daerah perkotaan meningkat menjadi sebesar Rp.204.521,- perkapita per bulan dan di daerah pedesaan menjadi sebesar Rp.150.024,- perkapita perbulan. Bahkan peningkatan yang terjadi selama tahun 2005 relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi selama tahun 2002.

4.2.2 Perkembangan Rumahtangga Miskin

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia termasuk daerah yang memiliki persentase rumahtangga miskin yang cukup banyak. Menurut hasil pengumpulan data oleh BPS, persentase rumahtangga miskin di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 1999-2005 cukup berarti. Pada awalnya persentase rumahtangga miskin di Sumatera Barat pada tahun 1999 terdapat sebanyak 12,03 persen, artinya terdapat penduduk sebanyak 12,03 persen dari seluruh rumahtangga di Sumatera Barat yang tidak mampu melewati batas garis kemiskinan atau hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.4. Persentase Rumahtangga Miskin Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 1999 dan 2005

Tahun	% Rumahtangga Miskin		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	13,86	11,29	12,03
2005	23,59	25,01	24,53

Sumber : BPS, berbagai publikasi

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada medio 1997, harga-harga kebutuhan pokok melambung cukup tinggi, sehingga dana yang harus dikeluarkan rumahtangga guna memenuhi kebutuhan hidup juga bertambah tinggi. Demikian juga halnya dengan garis kemiskinan, seiring dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, garis kemiskinan juga meningkat cukup signifikan, sementara

rata-rata pendapatan rumahtangga relative tidak berubah, bahkan dengan krisis ekonomi yang cukup hebat tidak sedikit kepala rumahtangga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat dimana mereka bekerja, hal ini memperburuk keadaan mereka.

Akibatnya, persentase rumahtangga miskin yang tadinya sempat mengalami penurunan dengan krisis ekonomi rumahtangga miskin kembali mengalami peningkatan dan pada tahun 1999 persentase rumahtangga miskin di Sumatera Barat tercatat sebanyak 13,86 persen di daerah perkotaan dan sekitar 11,29 persen di daerah pedesaan.

Memasuki era reformasi yang penuh dengan harapan untuk dapat hidup lebih baik, nampaknya belum dapat dirasakan oleh seluruh penduduk termasuk penduduk di Sumatera Barat. Setelah era reformasi yang penuh dengan harapan tersebut berjalan selama 6 tahun atau tepatnya tahun 2005 toh rumahtangga miskin di Sumatera Barat masih tetap meningkat. Pada tahun 2005 persentase rumahtangga miskin di Sumatera Barat tercatat sebanyak 24,53 persen dari seluruh rumahtangga yang ada di Sumatera Barat. Jika persentase rumahtangga miskin dirinci menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa persentase rumahtangga miskin di daerah pedesaan sedikit lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Terdapat sebanyak 23,59 persen rumahtangga miskin di daerah perkotaan dan sebanyak 25,01 persen di daerah pedesaan.

Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah, karena dengan semakin banyaknya persentase rumahtangga miskin beban pembangunan akan semakin berat. Jika dibandingkan antara pergeseran garis kemiskinan dengan perkembangan persentase rumahtangga miskin maka

dapat dikatakan bahwa akselerasi pertumbuhan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari relatif lebih lambat dibandingkan dengan akselerasi pertumbuhan garis kemiskinan.

4.3 Karakteristik Rumah tangga Miskin di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil Susenas 2005, di Sumatera Barat jumlah rumah tangga yang diteliti adalah sebanyak 10.592 rumah tangga yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Jumlah sampel susenas tersebut pada dasarnya sudah melalui metode sampling yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah seluruh rumah tangga sampel sesuai dengan hasil pencacahan yang dilakukan sekitar bulan Februari 2005.

Dalam pelaksanaan Susenas 2005 salah satu data yang dikumpulkan adalah data rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk keperluan konsumsi makanan dan non makanan. Data tersebut sangat berguna untuk mengetahui kemampuan ekonomi rumah tangga. Guna melihat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selanjutnya dapat dilihat persentase rumah tangga berdasarkan kelompok pengeluaran per bulan yang dirinci menurut daerah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 4.5. Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2005

Kelompok Pengeluaran (000 Rp)	Perkotaan			Pedesaan		
	Miskin	Tidak Miskin	Jumlah	Miskin	Tidak Miskin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 100	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01
100 - 199	0,82	0,00	0,19	1,44	1,03	1,13
200 - 299	1,88	0,62	0,91	7,47	2,97	4,09
300 - 399	5,52	0,87	1,97	11,09	5,04	6,55
400 - 499	5,52	2,68	3,35	15,62	6,42	8,72
500 - 599	12,09	3,15	5,26	21,14	8,45	11,62
600 - 699	13,15	4,68	6,67	15,34	11,05	12,12
700 - 799	14,32	4,10	6,51	10,51	10,46	10,47
800 - 899	12,09	7,14	8,31	7,81	8,91	8,63
900 - 999	10,21	6,38	7,28	5,00	8,97	7,97
1000-1099	6,81	6,56	6,62	2,18	7,15	5,90
1100-1199	4,81	5,73	5,51	1,55	5,96	4,86
1200 +	12,79	58,10	47,41	0,80	23,60	17,90
Jumlah	100,00 n=853	100,00 N=2763	100,00 n=3616	100,00 n=1749	100,00 n=5227	100,00 n=6976

Sumber : BPS, Sampel Rumahtangga Susenas 2005

Dengan membandingkan antara garis kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan jumlah rumahtangga yang termasuk kategori miskin sebanyak 2909 rumahtangga yang terdiri atas 1160 rumahtangga di perkotaan dan sebanyak 1749 rumahtangga di pedesaan.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 3616 rumahtangga yang ada di daerah perkotaan terdapat sebanyak 1160 rumahtangga atau sekitar 32,08 persen yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di daerah pedesaan dari 6.976

rumahtangga terdapat sebanyak 1.749 rumahtangga atau sekitar 25,07 persen yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran rumahtangga miskin di daerah perkotaan pada umumnya memiliki rata-rata pengeluaran Rp.500 ribu ke atas. Terdapat sebanyak 86,28 persen dari seluruh rumahtangga miskin di daerah perkotaan memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp.500 ribu ke atas perbulan. Sedangkan rumahtangga miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Rp. 500 ribu per bulan hanya terdapat sekitar 13,72 persen.

Lain halnya dengan yang terjadi di daerah pedesaan dimana rata-rata pengeluaran rumahtangga miskin tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Rata-rata pengeluaran rumahtangga miskin yang mencapai Rp.500 ribu ke bawah terdapat sebanyak 35 persen lebih sehingga rumahtangga miskin yang rata-rata pengeluarannya sekitar Rp.500 ribu ke atas hanya terdapat sebanyak 65 persen.

4.3.1 Rumahtangga Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumahtangga

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengantarkan manusia ke arah kedewasaan, karena dengan melalui pendidikan diharapkan masyarakat selain akan mendapat kesempatan untuk membina kemampuan dalam rangka mencari penghidupan yang lebih layak. Selain itu, dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat juga dapat lebih baik dalam mengatur pola kehidupannya.

Seperti yang dikatakan Mantra (2000) yang menyebutkan bahwa pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik, terampil dan terlatih

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja harus selalu lentur dan berwawasan lingkungan agar pendidikan keterampilan dan keahlian dapat disesuaikan dengan kebutuhan terhadap jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang selalu berubah

Tabel 4.6. Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kondisi Rumahtangga dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga Tahun 2008

No	Kondisi Rumahtangga	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Kepala Keluarga					
		Pedesaan			Perkotaan		
		SLTP Kebawah	SLTA Keatas	Jumlah	SLTP Kebawah	SLTA Keatas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Miskin	29,88	17,81	25,07	38,10	16,73	23,59
2	Tidak Miskin	70,12	82,19	74,93	61,90	83,27	76,41
	Jumlah	100,00 n=4.197	100,00 n=2.779	100,00 n=6976	100,00 n=1.160	100,00 n=2.456	100,00 n=3616

Sumber : BPS, Sampel Rumahtangga Susenas 2005

Berdasarkan hasil Susenas 2005, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumahtangga cukup bervariasi antara kepala rumahtangga yang tidak/belum pernah sekolah sampai dengan kepala rumahtangga berpendidikan S-2 dan bahkan S-3. Namun, dalam penelitian ini pendidikan kepala rumahtangga hanya akan dibagi menjadi 2 kelompok yakni kepala rumahtangga berpendidikan rendah (pendidikan tertingginya SLTP ke bawah) dan kepala rumahtangga berpendidikan tinggi (pendidikan tertingginya SLTA ke atas).

Tabel 4.6 di atas memperlihatkan bahwa di daerah perkotaan kepala rumahtangga yang menamatkan pendidikan tertingginya SLTP ke bawah tercatat sebanyak 51,82 persen dalam kondisi rumahtangganya miskin, sedangkan kepala

rumahtangga dengan pendidikan yang sama sebanyak 48,18 persen dan kondisi rumahtangganya tidak miskin. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kepala rumahtangga yang berpendidikan lebih baik (SLTA ke atas). Sebanyak 74,01 persen kepala rumahtangga di daerah perkotaan kondisi rumahtangganya tidak miskin, sedangkan rumahtangganya yang miskin hanya tercatat sebanyak 25,99 persen.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di daerah pedesaan. Tercatat sebanyak 29,88 persen rumahtangga miskin kepala rumahtangganya hanya berpendidikan SLTP ke bawah dan hanya tercatat sebanyak 17,81 persen kepala rumahtangga yang berpendidikan SLTA ke atas dengan kondisi rumahtangganya miskin.

Seangkan rumahtangga yang tidak miskin dicirikan dengan kepala rumahtangga yang berpendidikan SLTP ke bawah tercatat sebanyak 70,12 persen sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas tercatat sebanyak 82,19 persen.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang positif antara kemiskinan rumahtangga dengan pendidikan kepala rumahtangga dimana pada rumahtangga miskin kebanyakan kepala rumahtangganya berpendidikan rendah (SLTP ke bawah).

4.3.2 Rumahtangga Miskin Menurut Budaya Kerja (Jam Kerja perminggu)

Budaya kerja dalam penelitian ini dipresentasikan melalui jumlah jam kerja perminggu diduga turut berpengaruh terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Semakin banyak jam kerja yang dilakukan oleh kepala

rumahtangga diharapkan akan semakin banyak pendapatan yang akan diterima guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.7. Persentase Rumahtangga Miskin Menurut Kondisi Rumahtangga dan Jam Kerja Perminggu Tahun 2005

No	Kondisi Rumahtangga	Jam kerja perminggu (Jam)					
		Pedesaan			Perkotaan		
		<35	>=35	Jumlah	<35	>=35	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Miskin	26,04	19,19	25,07	25,25	17,43	23,59
2	Tidak Miskin	73,96	80,81	74,93	74,75	82,57	76,41
	Jumlah	100,00 n=1749	100,00 n=5227	100,00 n=6976	100,00 n=853	100,00 n=2763	100,00 n=3616

Sumber : BPS, Sampel Rumahtangga Susenas 2005

Berdasarkan hasil Susenas 2005, sebanyak 1749 kepala rumahtangga dari seluruh kepala rumahtangga di pedesaan bekerja kurang dari 35 jam perminggu, sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 853 kepala rumahtangga dari seluruh kepala rumahtangga bekerja di bawah 35 jam perminggu.

Dari kondisi demikian dapat dilihat bahwa kepala rumahtangga yang berdomisili di daerah perkotaan jauh lebih banyak yang bekerja melebihi dari jam kerja normal (35 jam perminggu). Sementara itu, kepala rumahtangga di daerah pedesaan yang bekerja melebihi jam kerja normal perminggu kondisinya relative hamper sama di perkotaan.

Jika dikaitkan dengan kondisi rumahtangga, dari seluruh rumahtangga miskin di daerah pedesaan terdapat sebanyak 26,04 persen kepala rumahtangga yang bekerja di bawah jam kerja normal sedangkan kepala rumahtangga yang

bekerja di atas jam kerja normal hanya terdapat sebanyak 19,19 persen. Jadi kepala rumahtangga miskin yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih banyak dari kepala rumahtangga yang bekerja di atas jam kerja normal.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di daerah perkotaan, persentase kepala rumahtangga miskin yang kepala rumahtangganya bekerja di bawah jam kerja normal relatif lebih besar dibandingkan dengan kepala rumahtangga yang bekerja di atas jam kerja normal. Terdapat sebanyak 25,25 persen kepala rumahtangga miskin yang bekerja di bawah jam kerja normal dari seluruh rumahtangga miskin yang berada di daerah perkotaan, kepala rumahtangga yang bekerja di atas jam kerja normal (35 jam ke atas per minggu) dalam kondisi miskin hanya terdapat sebanyak 17,43 persen.

Dari gambaran di atas tampak bahwa budaya kerja kepala rumahtangga miskin yang bertempat tinggal di perkotaan dan di pedesaan hampir tidak ada perbedaan. Di daerah perkotaan dan pedesaan kepala rumahtangga miskin lebih banyak yang melakukan mencari nafkah dengan jam kerja yang kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu.

4.3.3 Rumahtangga Miskin Menurut Kepemilikan Luas Lahan

Bagi daerah pedesaan, luas lahan yang dikuasai oleh rumahtangga merupakan modal utama dalam memperoleh pendapatan karena lapangan kerja mayoritas rumahtangga di daerah pedesaan adalah di sektor pertanian. Sedangkan di daerah perkotaan dimana sektor pertanian bukan merupakan sektor andalan, kepemilikan terhadap luas lahan juga merupakan modal yang cukup menentukan dalam kegiatan perekonomian.

Berdasarkan hasil Susenas 2005, rumahtangga miskin di daerah pedesaan yang memiliki lahan kurang dari 0,25 ha terdapat sebanyak 21,36 persen sedangkan sisanya yakni sebanyak 27,00 persen justeru memiliki luas lahan 0,25 Ha ke atas. Pola yang sama terjadi juga pada rumahtangga yang tidak miskin

Tabel 4.8. Persentase Rumahtangga Miskin Perkotaan Menurut Kondisi Rumahtangga dan Kepemilikan Luas Lahan Tahun 2005

No	Kondisi Rumahtangga	Luas lahan yang dikuasai (Ha)					
		Pedesaan			Perkotaan		
		<0,25	>=0,25	Jumlah	<0,25	>=0,25	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Miskin	21,36	27,00	25,07	20,77	41,46	23,59
2	Tidak Miskin	78,64	73,00	74,93	79,23	58,54	76,41
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sampel Rumahtangga Susenas 2005

Banyaknya persentase rumahtangga miskin yang memiliki lahan seluas 0,25 Ha ke atas memberikan indikasi bahwa sekalipun mereka memiliki lahan yang cukup luas, namun lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (lahan tidur) sehingga kepemilikan lahan pada rumahtangga di pedesaan belum dapat memberikan manfaat guna meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga, walaupun mereka memiliki lahan 0,25 Ha ke atas tetap saja mereka tergolong miskin, karena dengan lahan tidur tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka..

Sementara itu, rumahtangga miskin di perkotaan berbanding terbalik dengan kondisi di daerah pedesaan. Kebanyakan rumahtangga miskin di daerah perkotaan hanya menguasai luas lahan kurang dari 0,25 Ha. Terdapat sebanyak

20,77 persen dari seluruh rumahtangga miskin di daerah perkotaan yang luas lahannya kurang dari 0,25 Ha. Sementara itu sebanyak 41,46 persen adalah rumahtangga miskin yang memiliki luas lahan 0,25 Ha ke atas.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada rumahtangga yang tidak miskin, sebanyak 79,23 persen dari seluruh rumahtangga yang tidak miskin di daerah perkotaan memiliki luas lahan kurang dari 0,25 Ha. Sedangkan sebanyak 58,54 persen dari rumahtangga yang tidak miskin di perkotaan memiliki luas lahan 0,25 Ha ke atas.

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa di daerah perkotaan luas lahan menjadi masalah yang cukup penting dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kesulitan yang dialami oleh sebagian besar rumahtangga miskin di daerah perkotaan sebagai penyebabnya adalah keterbatasan luas lahan untuk berusaha. Sedangkan di daerah pedesaan sekalipun luas lahan yang dimiliki cukup luas namun masih banyak rumahtangga yang miskin. Diduga lahan yang dikuasai tidak dapat digunakan untuk berusaha dengan baik.

4.3.4 Rumahtangga Miskin Menurut Akses Informasi

Sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, berbagai media informasi sudah semakin beragam dan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi. Namun, kemajuan teknologi yang demikian pesat belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, karena untuk mendapatkan media informasi tersebut perlu didukung dengan biaya.

Berdasarkan hasil Susenas 2005, pada umumnya rumahtangga yang berdomisili di daerah pedesaan maupun di perkotaan masih banyak yang merasakan kesulitan untuk mengakses informasi.

Tabel 4.9. Persentase Rumahtangga Miskin Perkotaan Menurut Kondisi Rumahtangga dan Akses Informasi Tahun 2005

No	Rumahtangga	Pedesaan			Perkotaan		
		Akses Informasi			Akses Informasi		
		Sulit	Tdk Sulit	Jumlah	Sulit	Tdk Sulit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Miskin	26,24	4,74	25,07	30,13	7,25	23,59
2	Tidak Miskin	73,76	95,26	74,93	69,87	92,75	76,41
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sampel Rumahtangga Susenas 2005

Kondisi yang sama juga dialami oleh rumahtangga yang tidak miskin, dari seluruh rumahtangga yang tidak miskin di daerah pedesaan sebanyak 73,76 persen juga mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan terdapat sebanyak 95,26 persen yang mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Masih banyaknya rumahtangga yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi karena dukungan sarana dan prasarana informasi di pedesaan belum merata di seluruh daerah.

Kondisi yang agak lebih baik dialami oleh rumahtangga yang berdomisili di daerah perkotaan. Namun, bagi rumahtangga miskin tetap saja mayoritas dari mereka mengaku masih kesulitan dalam mengakses informasi. Dari Tabel 4.9 dapat dilihat terdapat sebanyak 30,13 persen dari seluruh rumahtangga miskin di

daerah perkotaan mengaku merasa kesulitan dalam mengakses informasi, dan hanya sebanyak 7,25 persen dari seluruh rumahtangga miskin di daerah perkotaan yang mengaku tidak kesulitan dalam mengakses informasi.

Sementara itu, rumahtangga yang tidak miskin di daerah perkotaan terdapat sebanyak 92,72 persen dari seluruh rumahtangga yang tidak miskin mengaku tidak kesulitan dalam mengakses informasi, dan tinggal sebanyak 69,87 persen lagi dari seluruh rumahtangga yang tidak miskin yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.

Dari ulasan di atas maka dapat dikatakan bahwa akses informasi di daerah pedesaan relatif masih lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan di daerah perkotaan di Sumatera Barat.

4.4 Hasil Estimasi

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya rumahtangga miskin dikelompokkan menjadi 2 (dua) daerah tempat tinggal yakni yang berdomisili di daerah Perkotaan dan di daerah Pedesaan, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) model.

Guna memperoleh hasil hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan penghitungan dengan menggunakan formula Regresi Logistik yang diolah dengan menggunakan pengolahan komputer melalui paket program SPSS for windows versi 11,5.

4.4.1 Daerah Pedesaan

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh karakteristik kepala rumahtangga berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jam kerja perminggu, luas lahan yang

dikuasai dan akses terhadap informasi. Untuk daerah pedesaan jumlah sampel rumahtangga yang diteliti sebanyak 6.976 rumahtangga. Adapun hasil regresi logistik adalah seperti pada Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10. Hasil penghitungan Regresi Logistik (Daerah Pedesaan)

Variabel	Koefisien (B)	Exp (B)	Wald	df	Sig
Pendidikan (X ₁)*	0,590	1,804	93,548	1	0,000
Budaya Kerja (X ₂)*	0,368	1,444	17,586	1	0,000
Luas Lahan (X ₃)*	- 0,187	0,829	9,230	1	0,002
Akses Informasi (X ₄)*	1,741	5,702	50,705	1	0,000
Konstanta	0,730	2,074	21,523	1	0,000
χ^2 dengan df=3 sebesar 253,875 χ^2 -tabel dengan df=4 dan nilai $\alpha = 5$ persen sebesar 7,815					

Catatan : *) = Signifikan pada tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa dari 4 variabel bebas yang diteliti ternyata masing-masing variabel memberikan pengaruh yang beragam, dan tidak seluruhnya menunjukkan pengaruh yang positif serta signifikan.

Selanjutnya, dari hasil regresi diperoleh nilai χ^2 -hitung sebesar 253,875. Sedangkan nilai χ^2 -tabel dengan df=4 dan nilai $\alpha = 5$ persen sebesar 7,815, sehingga nilai χ^2 -hitung > χ^2 -table. Dengan demikian seluruh variabel yakni pendidikan kepala keluarga, budaya kerja, luas lahan yang dikuasai dan akses terhadap informasi, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rumahtangga miskin di daerah pedesaan.

Bentuk pengaruh antara pendidikan kepala rumahtangga (X₁) terhadap rumahtangga miskin di pedesaan (Y) adalah **positif**. Maksudnya, kepala rumahtangga yang berpendidikan SLTA ke atas peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumahtangga miskin dibandingkan dengan rumahtangga yang kepala rumahtangganya berpendidikan SLTP ke bawah. Dari Tabel 4.10

terlihat bahwa koefisien regresi variabel pendidikan kepala rumahtangga sebesar 0,590 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan rumahtangga di pedesaan adalah **signifikan**.

Bentuk pengaruh antara budaya kerja yang dipresentasikan oleh jam kerja perminggu (X_2) terhadap jumlah rumahtangga miskin di pedesaan adalah **positif**. Maksudnya kepala rumahtangga yang bekerja lebih dari jam kerja normal (35 jam atau lebih perminggu) peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumahtangga miskin dibandingkan dengan rumahtangga yang kepala rumahtangganya bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam perminggu). Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien regresi variabel jam kerja perminggu sebesar 0,368 dan *probability significancy* sebesar 0,000 dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh budaya kerja (jam kerja perminggu) terhadap rumahtangga miskin di pedesaan **signifikan**.

Lain halnya dengan variabel luas lahan, bentuk pengaruh antara luas lahan yang dikuasai rumahtangga (X_3) terhadap rumahtangga miskin pedesaan menghasilkan koefisien regresi yang **negatif**. Artinya, probabilita rumahtangga yang memiliki luas lahan 0,25 ha ke atas untuk masuk kedalam kategori rumahtangga miskin lebih rendah dari rumahtangga yang memiliki luas lahan < 0,25 ha.. Selanjutnya, dari Tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien regresi variabel luas lahan sebesar -0,187 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam

penelitian ini H_a : **diterima** yang berarti bahwa luas lahan ternyata tidak berpengaruh secara **signifikan** terhadap rumahtangga miskin di pedesaan.

Sementara itu, bentuk pengaruh dari variabel akses informasi terhadap rumahtangga miskin di pedesaan (Y) adalah **positif**. Maksudnya, rumahtangga yang mudah akses informasinya memiliki peluang yang lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumahtangga miskin di bandingkan dengan rumahtangga yang sulit terhadap akses informasi. Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa koefisien regresi variabel akses informasi adalah sebesar 1,741 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh akses informasi terhadap kemiskinan rumahtangga di pedesaan adalah **signifikan**.

Hasil estimasi persamaan model logistik pada rumahtangga miskin di pedesaan diperoleh model regresi logistik sebagai berikut :

$$Y = \text{Ln} \{p/1-p\} = 0,730 + 0,590 X_1 + 0,368 X_2 - 0,187 X_3 + 1,741 X_4$$

Dari model logistik di atas diperoleh estimator $\beta_0 = 0,730$, pendidikan kepala rumahtangga (β_1) = 0,590. budaya kerja (β_2) = 0,368 luas lahan yang dikuasai (β_3) = -0,187 dan akses informasi (β_4) = 1,741 yang ditentukan dengan memakai metode estimasi kecenderungan maksimal, dengan pengertian hasil atau nilai yang diobservasi mempunyai kecenderungan maksimal.

Jika variabel pendidikan kepala keluarga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,590 meningkat satu unit sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala keluarga berpendidikan SLTP ke bawah di

pedesaan yang rumahtangganya cenderung miskin sebesar 78,92 persen (Lihat lampiran).

Dengan demikian, proporsi kepala keluarga yang berpendidikan SLTP ke bawah yang cenderung rumahtangganya miskin adalah sebanyak 78,92 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel pendidikan kepala keluarga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,804. Artinya, kemungkinan kepala keluarga yang berpendidikan SLTP ke bawah di pedesaan yang rumahtangganya miskin adalah sebesar 1,804 kali dibandingkan dengan kepala keluarga yang berpendidikan SLTA ke atas.

Selanjutnya, jika variabel budaya kerja kepala keluarga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,368 meningkat satu unit sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala keluarga di pedesaan dengan jam kerja perminggunya kurang dari 35 jam perminggu yang rumahtangganya cenderung miskin sebesar 74,99 persen (Lihat lampiran).

Dengan demikian, proporsi kepala keluarga yang budaya kerjanya kurang dari 35 jam perminggu yang cenderung rumahtangganya miskin adalah sebanyak 74,99 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel budaya kerja kepala keluarga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,444. Artinya, kemungkinan kepala keluarga yang budaya kerjanya kurang dari 35 jam perminggu yang rumahtangganya miskin adalah sebesar 1,444 kali dibandingkan dengan kepala keluarga yang budaya kerjanya 35 jam ke atas perminggu.

Variabel luas lahan yang dikuasai mempunyai koefisien regresi sebesar -0,187. Jika variabel luas lahan meningkat satu unit sementara variabel bebas

lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala keluarga dengan luas lahan kurang dari 0,25 Ha yang rumahtangganya cenderung miskin adalah sebesar 63,25 persen (Lihat lampiran).

Dengan demikian, proporsi kepala keluarga yang luas lahannya kurang dari 0,25 Ha yang cenderung rumahtangganya miskin adalah sebesar 63,25 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel luas lahan yang dikuasai rumahtangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 0,829. Nilai tersebut selanjutnya dapat diartikan, kemungkinan/peluang kepala keluarga yang luas lahannya kurang dari 0,25 Ha yang rumahtangganya miskin adalah sebesar 0,829 kali dibandingkan dengan kepala keluarga yang menguasai luas lahannya 0,25 Ha ke atas.

Selanjutnya untuk variabel akses informasi dengan koefisien regresi yang dihasilkan adalah sebesar 1,741 jika variabel akses informasi naik 1 unit sementara variabel lainnya tetap, maka proporsi kepala keluarga di pedesaan yang mengalami kesulitan terhadap akses informasi yang rumahtangganya cenderung miskin adalah sebesar 92,21 persen (Lihat lampiran).

Sehingga, proporsi kepala keluarga dengan akses informasi yang sulit adalah sebanyak 92,21 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel akses informasi dari hasil penghitungan regresi logistik adalah sebesar 5,702. Nilai tersebut mengandung arti, kemungkinan rumahtangga yang mengalami kesulitan dalam akses informasi di pedesaan kecenderungan rumahtangganya miskin adalah sebesar 5,702 kali dibandingkan dengan rumahtangga yang tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.

4.4.2 Daerah Perkotaan

Dengan jumlah variabel yang sama selanjutnya penelitian ini akan dianalisis pengaruh karakteristik kepala rumahtangga berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jam kerja perminggu, luas lahan yang dikuasai dan akses terhadap informasi bagi rumahtangga yang berdomisili di daerah perkotaan. Untuk daerah perkotaan jumlah sampel rumahtangga yang diteliti sebanyak 3.616 rumahtangga. Adapun hasil regresi logistik adalah seperti pada Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11. Hasil penghitungan Regresi Logistik (Daerah Perkotaan)

Variabel	Koefisien (B)	Exp (B)	Wald	df	Sig
Pendidikan (X ₁)*	0,822	2,275	90,094	1	0,000
Budaya Kerja (X ₂)*	0,430	1,538	15,160	1	0,000
Luas Lahan (X ₃)*	-0,645	0,525	34,678	1	0,000
Akses Informasi (X ₄)*	1,451	4,267	124,246	1	0,000
Konstanta	0,624	1,866	8,723	1	0,003
χ^2 dengan df=3 sebesar 421,457 χ^2 -tabel dengan df=4 dan nilai $\alpha = 5$ persen sebesar 7,815					

Catatan : *) = Signifikan pada tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05

Hasil penghitungan regresi logistik di daerah perkotaan dapat dilihat bahwa dari 4 variabel bebas yang diteliti ternyata masing-masing variabel memberikan pengaruh yang beragam, dan tidak seluruhnya menunjukkan pengaruh yang positif serta signifikan.

Selanjutnya, dari hasil regresi diperoleh nilai χ^2 -hitung sebesar 421,457. Sedangkan nilai χ^2 -tabel dengan df=4 dan nilai $\alpha = 5$ persen sebesar 7,815,

sehingga nilai $\chi^2_{\text{-hitung}} > \chi^2_{\text{-table}}$. Dengan demikian seluruh variabel yakni pendidikan kepala keluarga, budaya kerja, luas lahan yang dikuasai dan akses terhadap informasi, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rumahtangga miskin di daerah perkotaan.

Bentuk pengaruh antara pendidikan kepala rumahtangga (X_1) terhadap rumahtangga miskin di perkotaan (Y) adalah **positif**. Artinya, probabilita kepala rumahtangga dengan kepala rumahtangganya berpendidikan SLTA ke atas masuk kedalam kategori rumahtangga miskin lebih rendah dari rumahtangga dengan kepala rumahtangganya berpendidikan SLTP ke bawah. Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa koefisien regresi variabel pendidikan kepala rumahtangga sebesar 0,822 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh tingkat pendidikan kepala rumahtangga terhadap kemiskinan rumahtangga di perkotaan adalah **signifikan**.

Bentuk pengaruh antara budaya kerja yang dipresentasikan oleh jam kerja perminggu (X_2) terhadap jumlah rumahtangga miskin di perkotaan adalah **positif**. Maksudnya probabilita kepala rumahtangga yang bekerja lebih dari jam kerja normal (35 jam ke atas perminggu) untuk masuk kedalam kategori rumahtangga miskin lebih rendah dari rumahtangga dengan kepala rumahtangganya bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam perminggu). Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa koefisien regresi variabel jam kerja perminggu sebesar 0,430 dan *probability significancy* sebesar 0,000 dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa

pengaruh budaya kerja (jam kerja perminggu) terhadap rumahtangga miskin di perkotaan adalah **signifikan**.

Tetapi untuk variabel luas lahan, bentuk pengaruh antara luas lahan yang dikuasai rumahtangga (X_3) terhadap rumahtangga miskin perkotaan juga menghasilkan koefisien regresi yang **negatif**. Artinya, probabilita rumahtangga yang memiliki luas lahan 0,25 ha ke atas masuk kedalam kategori rumahtangga miskin lebih rendah dari rumahtangga yang memiliki luas lahan $< 0,25$ ha.. Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa koefisien regresi variabel luas lahan sebesar -0,645 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima** yang berarti bahwa luas lahan ternyata tidak berpengaruh secara **signifikan** terhadap rumahtangga miskin di perkotaan.

Sementara itu, bentuk pengaruh dari variabel akses informasi terhadap rumahtangga miskin di perkotaan (Y) adalah **positif**. Maksudnya, probabilita rumahtangga yang mudah mengakses informasi masuk kedalam kategori rumahtangga miskin lebih rendah dari rumahtangga yang sulit mengakses informasi. Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa koefisien regresi variabel akses informasi adalah sebesar 1,451 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0 : **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a : **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh akses informasi terhadap kemiskinan rumahtangga di perkotaan **signifikan**.

Hasil estimasi persamaan model logistik pada rumahtangga miskin di perkotaan diperoleh model regresi logistik sebagai berikut :

$$Y = \text{Ln} \{p/1-p\} = 0,624 + 0,822 X_1 + 0,430 X_2 - 0,645 X_3 + 1,451 X_4$$

Dari model logistik di atas diperoleh estimator $\beta_0 = 0,624$, pendidikan kepala rumahtangga (β_1) = 0,822. budaya kerja (β_2) = 0,430 luas lahan yang dikuasai (β_3) = -0,645 dan akses informasi (β_4) = 1,451 yang ditentukan dengan memakai metode estimasi kecenderungan maksimal, dengan pengertian hasil atau nilai yang diobservasi mempunyai kecenderungan maksimal.

Jika variabel pendidikan kepala keluarga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,822 meningkat satu unit sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala keluarga berpendidikan SLTP ke bawah di perkotaan yang rumahtangganya cenderung miskin sebesar 80,94 persen (Lihat lampiran).

Dengan demikian, proporsi kepala keluarga yang berpendidikan SLTP ke bawah yang cenderung rumahtangganya miskin adalah sebanyak 80,94 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel pendidikan kepala keluarga di perkotaan dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 2,275. Artinya, kemungkinan kepala keluarga yang berpendidikan SLTP ke bawah di perkotaan yang rumahtangganya miskin adalah sebesar 2,275 kali dibandingkan dengan kepala keluarga yang berpendidikan SLTA ke atas.

Selanjutnya, jika variabel budaya kerja kepala keluarga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,430 meningkat satu unit sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala keluarga dengan jam kerja perminggunya kurang dari 35 jam perminggu yang rumahtangganya cenderung miskin sebesar 74,15 persen (Lihat lampiran).

Dengan demikian, proporsi kepala keluarga yang budaya kerjanya kurang dari 35 jam perminggu yang cenderung rumahtangganya miskin adalah sebanyak 74,15 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel budaya kerja kepala keluarga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,538. Artinya, kemungkinan kepala keluarga di perkotaan yang budaya kerjanya kurang dari 35 jam perminggu yang rumahtangganya miskin adalah sebesar 1,538 kali dibandingkan dengan kepala keluarga yang budaya kerjanya 35 jam ke atas perminggu.

Variabel luas lahan yang dikuasai mempunyai koefisien regresi sebesar -0,645. Jika variabel luas lahan yang mempunyai koefisien regresi sebesar -0,645 meningkat satu unit sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala keluarga dengan luas lahan kurang dari 0,25 Ha di perkotaan yang rumahtangganya cenderung miskin adalah sebesar 49,48 persen (Lihat lampiran).

Dengan demikian, proporsi kepala keluarga yang luas lahannya kurang dari 0,25 Ha yang cenderung rumahtangganya miskin adalah sebesar 49,48 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel luas lahan yang dikuasai rumahtangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 0,525. Artinya, kemungkinan kepala keluarga yang luas lahannya kurang dari 0,25 Ha yang rumahtangganya miskin adalah sebesar 0,525 kali dibandingkan dengan kepala keluarga yang luas lahannya 0,25 Ha ke atas.

Selanjutnya untuk variabel akses informasi dengan koefisien regresi yang dihasilkan adalah sebesar 1,451 jika variabel akses informasi naik 1 unit sementara variabel lainnya tetap, maka proporsi kepala keluarga yang mengalami

kesulitan terhadap akses informasi yang rumahtangganya cenderung miskin adalah sebesar 88,84 persen (Lihat lampiran).

Sehingga, proporsi kepala keluarga dengan akses informasi yang sulit adalah sebanyak 88,84 persen. Sementara itu, nilai Odd-Ratio (OR) dari variabel akses informasi dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 4,267. Artinya, kemungkinan rumahtangga yang mengalami kesulitan dalam akses informasinya kecenderungan rumahtangganya miskin adalah sebesar 4,267 kali dibandingkan dengan rumahtangga yang tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.

4.5 Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini menemukan kenyataan bahwa keempat variabel seperti tingkat pendidikan kepala rumahtangga, budaya kerja, luas lahan yang dikuasai rumahtangga dan akses informasi baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan pengaruhnya bervariasi terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat.

Variabel pendidikan kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala rumahtangga yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) cenderung rumahtangganya miskin sebesar 2,275 kali di perkotaan dan sebesar 1,804 kali di daerah pedesaan dibanding kepala rumahtangga yang berpendidikan SLTA ke atas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting terutama dalam meningkatkan kreativitas penduduk agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik lagi.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Comb dan Ahmed (1985) yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah sama dengan belajar,

dimana, kapan dan siapa saja. Pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan informal yang merupakan suatu proses belajar seumur hidup bagi setiap orang dalam mencari dan menghimpun pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengertian yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari, lingkungan, teladan dan perilaku kerabat. Jadi, pendidikan tidak selalu harus diartikan sebagai pendidikan formal dalam rangka meningkatkan wawasan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan informal seperti meningkatkan keterampilan guna meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan **pendapatan** rumahtangga.

Demikian juga halnya pendapat yang dikemukakan oleh Gallup dalam Madrie (1986) yang menyatakan bahwa perubahan perilaku itu merupakan hasil dari proses pendidikan. Sehingga dengan pendidikan akan terjadi perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan (guna meningkatkan **pendapatan**), perubahan sikap serta berubahnya norma-norma yang dipakai masyarakat.

Dengan adanya temuan ini maka dapat dikatakan bahwa variable pendidikan kepala rumahtangga khususnya dan pendidikan masyarakat pada umumnya merupakan variable yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan rumahtangga. Untuk itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan perlu dilakukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat perlu dilakukan sosialisasi tentang berbagai keterampilan praktis yang dapat menunjang kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Selanjutnya variabel budaya kerja yang dipresentasikan dengan jumlah jam kerja kepala rumahtangga perminggu, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kerja juga signifikan terhadap pembentukan rumahtangga miskin di

Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan koefisien regresi variable budaya kerja (jam kerja perminggu) sebesar 0,430 (perkotaan) dan sebesar 0,368 (pedesaan) serta nilai *Odd Ratio* (1,538 di perkotaan dan sebesar 1,444 di daerah pedesaan). Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat juga dapat dipengaruhi oleh lamanya jam kerja yang dilakukan oleh kepala rumahtangga.

Kebiasaan membuang waktu di "*lapau*" bagi penduduk Sumatera Barat sudah waktunya dirubah dengan lebih mengoptimalkan waktu untuk melakukan kegiatan bekerja yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik lagi.

Sementara itu, variabel luas lahan yang dikuasai rumahtangga dari hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif serta nilai *Odd ratio* di bawah nilai satu (0,829 di daerah pedesaan dan sebesar 0,525 di daerah perkotaan). Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa berapapun luas lahan yang dikuasai oleh rumahtangga tidak terbukti berpengaruh terhadap kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat. Sumatera Barat dengan luas lahan yang masih memadai merupakan modal utama dalam menghasilkan pendapatan rumahtangga. Namun seperti tampak di lapangan tidak sedikit pula lahan yang tidak diusahakan oleh masyarakat, sehingga luas lahan yang dimiliki oleh rumahtangga walaupun arealnya cukup luas (lebih dari 0,25 ha), namun jika tidak diusahakan, tidak ada artinya bagi peningkatan pendapatan rumahtangga yang bersangkutan. Bimbingan kepada masyarakat yang diringi dengan pemberian bibit gratis dan penyuluhan dari petugas pertanian menjadi variabel yang cukup besar perannya dalam rangka meningkatkan pendapatan rumahtangga. Dengan adanya bimbingan, pemberian

bibit gratis dan penyuluhan kepada penduduk terutama di pedesaan, diharapkan akan menjadi salah satu upaya dalam memanfaatkan lahan tidur yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Variabel akses informasi hasil penelitian ini menyimpulkan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumahtangga yang akses terhadap informasinya mengalami kesulitan cenderung rumahtangganya menjadi miskin. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif serta ditunjang dengan nilai *Odd Ratio* yang lebih dari satu (sebesar 4,267 di daerah perkotaan dan sebesar 5,702 di daerah pedesaan). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa rumahtangga yang mengalami kesulitan akses informasinya cenderung menjadi miskin sebesar 4,267 kali (perkotaan) dan 5,702 kali (pedesaan) daripada rumahtangga yang mendapatkan kemudahan dalam akses informasi.

4.6 Implikasi Kebijakan

Dengan terbuktinya variabel pendidikan yang signifikan terhadap terbentuknya rumahtangga miskin hal ini hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah terutama dalam meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat hendaknya dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokuskan kepada generasi berikutnya.

Hanya dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan anggaran pembangunan pada sektor pendidikan diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada masa yang akan datang.

Berkaitan dengan masalah budaya kerja, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat masih banyak yang melakukan pekerjaan dengan waktu yang belum optimal. Sehingga rata-rata jumlah jam kerja perminggu masih cukup banyak yang dibawah jam kerja normal yakni di bawah 35 jam perminggu. Kondisi tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah terutama dalam melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan waktu bekerja seoptimal mungkin agar produktivitas yang dihasilkan dapat lebih meningkat lagi. Dengan adanya produktivitas meningkat diharapkan pendapatan rumahtangga juga akan mengalami peningkatan dan pada akhirnya kebutuhan rumahtangga yang paling mendasar akan dapat dipenuhi sehingga mereka dapat hidup di atas garis kemiskinan.

Masih luasnya lahan yang belum diusahakan oleh penduduk terutama di daerah pedesaan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya masyarakat dalam menggarap lahan yang mereka kuasai. Dalam hal ini Pemerintah hendaknya lebih intens untuk menyadarkan masyarakat pedesaan dalam meningkatkan produktivitas mereka melalui pemanfaatan lahan tidur yang diidentifikasi masih cukup luas dimiliki masyarakat.

Sekalipun kemajuan di bidang informasi sudah cukup maju, namun kenyataan di lapangan masih cukup banyak masyarakat Sumatera Barat yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi. Masih belum meratanya informasi terutama di daerah pedesaan menjadi salah satu pekerjaan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akhirnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendidikan kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Artinya, sedikit banyaknya rumahtangga miskin di daerah pedesaan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumahtangga itu sendiri.
2. Bentuk pengaruh antara budaya kerja yang dipresentasikan oleh jam kerja perminggu berpengaruh secara signifikan terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Artinya, semakin banyak jam kerja yang dilakukan oleh kepala rumahtangga maka akan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan rumahtangga guna memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga. Sehingga rumahtangga yang kam kerjanya di bawah normal cenderung akan menjadi miskin karena pendapatannya rendah.
3. Pengaruh antara luas lahan yang dikuasai rumahtangga terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat menghasilkan tidak berpengaruh terhadap rumahtangga miskin. Artinya, peluang rumahtangga yang memiliki luas lahan kurang dari 0,25 ha lebih rendah dibandingkan dengan rumahtangga yang memiliki luas lahan 0,25 ha ke atas. Kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat tidak semata-mata disebabkan karena sempitnya

lahan yang dikuasai oleh rumahtangga tetapi diindikasikan masih banyak lahan yang tidak produktif (lahan tidur) terutama di daerah pedesaan.

4. Variabel akses informasi secara signifikan berpengaruh terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Maksudnya, sedikit banyaknya rumahtangga miskin di Sumatera Barat salah satunya diakibatkan oleh kurangnya akses informasi. Kemudahan akses informasi dengan adanya kemajuan teknologi masih belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Sumatera Barat.

5.1 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan seperti yang telah diuraikan di atas, akhirnya peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya turun tangan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan informal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Cukup signifikannya lama jam kerja terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat terus meningkatkan tingkat produktivitas di seluruh sektor dengan bekerja lebih tekun.
3. Di daerah pedesaan luas lahan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat. Untuk itu, perlu adanya upaya Pemerintah guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka penggunaan *lahan tidur* melalui bimbingan, pemberian bibit dan pupuk gratis atau bersubsidi dan penyuluhan yang terus menerus yang bertujuan guna peningkatan pendapatan rumahtangga.

4. Guna memudahkan akses informasi pemerintah perlu mempertimbangkan media yang tepat dan gratis bagi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Bellante dan Jakson (1990) *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- BPS, 1990. *Hasil Survey Biaya Hidup 1989 (SBH)*, Penerbit BPS Jakarta Indonesia
- _____, 1993. *Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 1992)*. Penerbit, BPS Jakarta
- _____, 1999. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, Penerbit BPS Jakarta Indonesia
- _____, 2003. *Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Tahun 2002)*, Penerbit BPS Jakarta
- Esmara Hendra, 1976. *Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang
- _____, 1989. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Elfindri, 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Universitas Andalas Padang.
- Gujarati, 1993. *Ekonomi Dasar*. Erlangga. Jakarta.
- Hassibuan, 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. PT. Pustaka Indonesia.
- _____, 1997. *Organisasi dan Motivasi*. PT. Pustaka Indonesia.
- Hasbullah, 2003. *Perekonomian Indonesia. Masalah dan Implementasi Kebijakan*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Herman P Suryadi, 2002. "Roda berputar Dunia bergulir" Kognisi baru tentang timbul tenggelamnya Sosialisasi.
- Hidayat, 1978. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)* Vol. XXVI, No.4 Desember.
- Jhon Kenneth Galbraith, 1978. *Almost Everyones Guide to Economic* (With Nicole Salinger).

- _____, 1989. "The International Economy" Prentice Hall Englewood Clif New Jersey. Second Edition.
- Mantra, 2000. *Langkah-langkah Penelitian Survey, Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian* Cetakan ke dua.
- Mintoro, 1983. *Aspek-aspek Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian Tahap I dan II*.
- _____, 1996. *ManaOrgjemen SDM*. Penerbit Pelita Jakarta.
- Mulyana, 1998. *Komunikasi anisasi*
- _____, 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Rosda Bandung.
- Prayitno, 2000. "Psikologi Pendidikan". FIP Bandung
- Sayogyo, 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Hidup Minimum Pangan*, Kompas 17 Nopeber 1977.
- Sofyardi, 2007. *Analisa Regresi Logistik Dalam Ilmu Ekonomi*. Makalah pada pelatihan Teknik Pengajaran Statistik Multivariat untuk Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Universitas Andalas Padang (03 Januari 2007).
- Sumarwan. 1993. *Keluarga Masa Depan dan Perubahan Pola Konsumsi*. Warta Demografi. Tahun ke-23 No.5. LD.FEUI. Jakarta.
- Suryadi, 1997. *Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Sosialisasi*.
- Sutyastie dkk, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia Rineka Cipta*, Jakarta.
- Todaro, 1985. *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang*, Akademika Pressindo. Jakarta.
- _____, 1987. *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang Buku I*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 1997. *Perkembangan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- _____, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (edisi keenam) Alih bahasa Haaris Munandar*, Erlangga, Jakarta.
- Zahara Idris D Lisma Jamal, 1992. *Pengantar Pendidikan*. PT Gramedia Widya Sarana Indonesia

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kemiskinan * Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan * Daerah	10592	100,0%	0	,0%	10592	100,0%
Kemiskinan * Jam kerja perminggu * Daerah	10592	100,0%	0	,0%	10592	100,0%
Kemiskinan * luas lahan * Daerah	10592	100,0%	0	,0%	10592	100,0%
Kemiskinan * Akses Informasi * Daerah	10592	100,0%	0	,0%	10592	100,0%

Kemiskinan * Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan * Daerah Crosstabulation

Daerah	Kemiskinan	Miskin	Count	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		Total	
				SLTP ke bawah	SLTA ke atas		
Perkotaan	Kemiskinan	Miskin	Count	442	411	853	
			% within Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	38,1%	16,7%	23,6%	
			% of Total	12,2%	11,4%	23,6%	
			Tidak Miskin	Count	718	2045	2763
	Total			% within Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	61,9%	83,3%	76,4%
				% of Total	19,9%	56,6%	76,4%
				Count	1160	2456	3616
				% within Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	100,0%	100,0%	100,0%
Pedesaan	Kemiskinan	Miskin	Count	1254	495	1749	
			% within Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	29,9%	17,8%	25,1%	
			% of Total	18,0%	7,1%	25,1%	
			Tidak Miskin	Count	2943	2284	5227
	Total			% within Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	70,1%	82,2%	74,9%
				% of Total	42,2%	32,7%	74,9%
				Count	4197	2779	6976
				% within Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	100,0%	100,0%	100,0%
Total			% of Total	60,2%	39,8%	100,0%	

Kemiskinan * Jam kerja perminggu * Daerah Crosstabulation

				Jam kerja perminggu		Total
				Kurang dari 35 jam/minggu	35 jam ke atas perminggu	
Perkotaan	Kemiskinan	Miskin	Count	719	134	853
			% within Jam kerja perminggu	25,3%	17,4%	23,6%
			% of Total	19,9%	3,7%	23,6%
	Tidak Miskin	Count	2128	635	2763	
		% within Jam kerja perminggu	74,7%	82,6%	76,4%	
		% of Total	58,8%	17,6%	76,4%	
	Total		Count	2847	769	3616
		% within Jam kerja perminggu	100,0%	100,0%	100,0%	
		% of Total	78,7%	21,3%	100,0%	
Pedesaan	Kemiskinan	Miskin	Count	1559	190	1749
			% within Jam kerja perminggu	26,0%	19,2%	25,1%
			% of Total	22,3%	2,7%	25,1%
	Tidak Miskin	Count	4427	800	5227	
		% within Jam kerja perminggu	74,0%	80,8%	74,9%	
		% of Total	63,5%	11,5%	74,9%	
	Total		Count	5986	990	6976
		% within Jam kerja perminggu	100,0%	100,0%	100,0%	
		% of Total	85,8%	14,2%	100,0%	

Kemiskinan * luas lahan * Daerah Crosstabulation

Daerah				luas lahan		Total
				Kurang dari 0,25 Ha	0,25 Ha ke atas	
Perkotaan	Kemiskinan	Miskin	Count	649	204	853
			% within luas lahan	20,8%	41,5%	23,6%
			% of Total	17,9%	5,6%	23,6%
		Tidak Miskin	Count	2475	288	2763
			% within luas lahan	79,2%	58,5%	76,4%
			% of Total	68,4%	8,0%	76,4%
	Total	Count	3124	492	3616	
		% within luas lahan	100,0%	100,0%	100,0%	
		% of Total	86,4%	13,6%	100,0%	
Pedesaan	Kemiskinan	Miskin	Count	509	1240	1749
			% within luas lahan	21,4%	27,0%	25,1%
			% of Total	7,3%	17,8%	25,1%
		Tidak Miskin	Count	1874	3353	5227
			% within luas lahan	78,6%	73,0%	74,9%
			% of Total	26,9%	48,1%	74,9%
	Total	Count	2383	4593	6976	
		% within luas lahan	100,0%	100,0%	100,0%	
		% of Total	34,2%	65,8%	100,0%	

Kemiskinan * Akses Informasi * Daerah Crosstabulation

Daerah				Akses Informasi		Total
				Sulit	Tidak Sulit	
Perkotaan	Kemiskinan	Miskin	Count	778	75	853
			% within Akses Informasi	30,1%	7,3%	23,6%
			% of Total	21,5%	2,1%	23,6%
		Tidak Miskin	Count	1804	959	2763
			% within Akses Informasi	69,9%	92,7%	76,4%
			% of Total	49,9%	26,5%	76,4%
	Total	Count	2582	1034	3616	
		% within Akses Informasi	100,0%	100,0%	100,0%	
		% of Total	71,4%	28,6%	100,0%	
Pedesaan	Kemiskinan	Miskin	Count	1731	18	1749
			% within Akses Informasi	26,2%	4,7%	25,1%
			% of Total	24,8%	,3%	25,1%
		Tidak Miskin	Count	4865	362	5227
			% within Akses Informasi	73,8%	95,3%	74,9%
			% of Total	69,7%	5,2%	74,9%
	Total	Count	6596	380	6976	
		% within Akses Informasi	100,0%	100,0%	100,0%	
		% of Total	94,6%	5,4%	100,0%	

Logistic Regression (DAERAH PERKOTAAN)

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	3616	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	3616	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		3616	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Miskin	0
Tidak Miskin	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Kemiskinan		
			Miskin	Tidak Miskin	
Step 0	Kemiskinan	Miskin	0	853	,0
		Tidak Miskin	0	2763	100,0
Overall Percentage					76,4

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1,175	,039	900,344	1	,000	3,239

Variables not in the Equation

Step	Variables	Score	df	Sig.
0	DIDIKS	199,595	1	,000
	JAMKER2	20,591	1	,000
	LAHAN2	100,935	1	,000
	AKSES	214,399	1	,000
Overall Statistics		393,509	4	,000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	421,457	4	,000
	Block	421,457	4	,000
	Model	421,457	4	,000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	3529,406	,110	,166

Classification Table^a

Observed		Predicted			
		Kemiskinan		Percentage Correct	
		Miskin	Tidak Miskin		
Step 1	Kemiskinan	Miskin	125	728	14,7
		Tidak Miskin	103	2660	96,3
	Overall Percentage				77,0

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	DIDIKS	,822	,087	90,094	1	,000	2,275
	JAMKER2	,430	,110	15,160	1	,000	1,538
	LAHAN2	-,645	,110	34,678	1	,000	,525
	AKSES	1,451	,130	124,246	1	,000	4,267
	Constant	,624	,211	8,723	1	,003	1,866

a. Variable(s) entered on step 1: DIDIKS, JAMKER2, LAHAN2, AKSES.

Logistic Regression DAERAH PEDESAAN

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	6976	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	6976	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		6976	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Miskin	0
Tidak Miskin	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Kemiskinan		
			Miskin	Tidak Miskin	
Step 0	Kemiskinan	Miskin	0	1749	,0
		Tidak Miskin	0	5227	100,0
Overall Percentage					74,9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1,095	,028	1570,725	1	,000	2,989

Variables not in the Equation

Step	Variables	Score	df	Sig.
0	DIDIKS	129,581	1	,000
	JAMKER2	21,232	1	,000
	LAHAN2	26,548	1	,000
	AKSES	88,463	1	,000
Overall Statistics		218,658	4	,000

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	253,875	4	,000
	Block	253,875	4	,000
	Model	253,875	4	,000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	7602,792	,036	,053

Classification Table^a

		Predicted		
		Kemiskinan		Percentage Correct
Observed		Miskin	Tidak Miskin	
Step 1	Kemiskinan	Miskin 0	Tidak Miskin 1749	,0
		Tidak Miskin 0	5227	100,0
Overall Percentage				74,9

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1	DIDIKS	,590	,061	93,548	1	,000	1,804
	JAMKER2	,368	,088	17,586	1	,000	1,444
	LAHAN2	-,187	,062	9,230	1	,002	,829
	AKSES	1,741	,244	50,705	1	,000	5,702
	Constant	,730	,157	21,523	1	,000	2,074

a. Variable(s) entered on step 1: DIDIKS, JAMKER2, LAHAN2, AKSES.

Perkotaan

Pedesaan

Uraian	X1	X2	X3	X4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konstanta	0,624	0,624	0,624	0,624
X	0,822	0,430	-0,645	1,451
Ln {p/1-p}	1,446	1,054	-0,021	2,075
Exp (p)	4,2461	2,8691	0,9792	7,9645
	1	1	1	1
1 + Exp (p)	5,2461	3,8691	1,9792	8,9645
Exp (p)/ 1+Exp(p)	0,8094	0,7415	0,4948	0,8884
%	80,94	74,15	49,48	88,84

Uraian	X1	X2	X3	X4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konstanta	0,730	0,730	0,730	0,730
X	0,590	0,368	-0,187	1,741
Ln {p/1-p}	1,32	1,098	0,543	2,471
Exp (p)	3,7434	2,9982	1,7212	11,8343
	1	1	1	1
1 + Exp (p)	4,7434	3,9982	2,7212	12,8343
Exp (p)/ 1+Exp(p)	0,7892	0,7499	0,6325	0,9221
%	78,92	74,99	63,25	92,21